

**ANALISIS POTENSI PENGEMBANGAN PARIWISATA
HALAL DI PULAU BALI DALAM KONSEP EKONOMI
PEMBANGUNAN ISLAM**

SKRIPSI



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh:

SHELDA MOENA APRILITA

NIM: E20192081

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI BISNIS DAN ISLAM
SEPTEMBER 2023**

**ANALISIS POTENSI PENGEMBANGAN PARIWISATA
HALAL DI PULAU BALI DALAM KONSEP EKONOMI
PEMBANGUNAN ISLAM**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi (SE)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Ekonomi Syariah



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh:

Shelda Moena Aprilita
NIM : E20192081

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
SEPTEMBER 2023**

**ANALISIS POTENSI PENGEMBANGAN PARIWISATA
HALAL DI PULAU BALI DALAM KONSEP EKONOMI
PEMBANGUNAN ISLAM**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi (SE)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Ekonomi Syariah

Oleh:

Shelda Moena Aprilita
NIM : E20192081

Dosen Pembimbing;

Dr. M.F. Hidayatullah, S.H.I., M.S.I
NIP. 197608122008011015

**ANALISIS POTENSI PENGEMBANGAN PARIWISATA
HALAL DI PULAU BALI DALAM KONSEP EKONOMI
PEMBANGUNAN ISLAM**

SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam
Program Studi Ekonomi Syariah

Hari : Jum'at
Tanggal : 01 September 2023

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris



M. Saiful Anam, S.Ag., M.Ag
NIP. 197111142003121002



Dr. Rini Puji Astuti S.Kom., M.Si
NUP. 201708174

Anggota :

1. Dr. Hersa Farida Qoriani, M.E.I
2. Dr. M.F Hidayatullah S.H.I., M.S.I



Menyetujui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dr. Khandan Rika S.E., M.Si
NIP. 196808072000031001

MOTTO

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ
وَالِيهِ النُّشُورُ

Artinya: “Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu yang mudah dijelajahi, maka jelajahilah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezeki-Nya. Dan hanya kepada-Nyalah kamu (kembali setelah) dibangkitkan”. (Q.S Al-Mulk : 15)¹

UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

¹ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segala puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan Rahmat serta hidayahnya sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Dan tak lupa pula sholawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW berkat beliaulah kita bisa mengenal Islam, nikmatnya iman dan ihsan. Penelitian skripsi ini saya persembahkan untuk beberapa pihak yang telah meluangkan waktunya untuk membantu sampai tahap ini:

1. Kepada kedua orang tua (Bapak Suratman dan Ibu Khosidah) yang tiada henti dalam memberikan doa, dukungan serta memberikan semangat yang tak ada habisnya hingga saat ini.
2. Seluruh keluarga besar saya yang telah memberikan semangat serta membantu dalam mencapai cita-cita penulis.
3. Dosen pembimbing yang telah sabar membimbing penulis dan selalu memberikan motivasi kepada penulis serta memberikan semangat agar tidak mudah menyerah dalam mencapai cita-citanya.
4. Terima kasih saya ucapkan kepada seluruh pihak Dinas Pariwisata Provinsi Bali berkat bantuan beliau saya bisa menyelesaikan penelitian skripsi ini.
5. Teman kelas Ekonomi Syariah 2 dan semua teman-teman yang telah memberikan dukungan serta saling memberikan kekuatan dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
6. Almamater UIN KHAS Jember tercinta sudah memberikan saya kesempatan dalam menuntut ilmu.

ABSTRAK

Shelda Moena Aprilita, 2023: *Analisis Potensi Pengembangan Pariwisata Halal di Pulau Bali dalam Konsep Ekonomi Pembangunan Islam.*

Kata kunci: pariwisata halal, ekonomi pembangunan islam

Pariwisata halal merupakan salah satu bentuk wisata yang berbasis budaya dengan mengutamakan nilai-nilai dan norma syariat Islam sebagai pondasi utama. Selain makanan dan minuman halal, yang lebih penting adalah tersedianya akomodasi yang memudahkan wisatawan dalam melaksanakan ibadahnya. Berdasarkan pandangan ini, poin penting dalam pembangunan adalah bagaimana menciptakan tatanan kehidupan yang dapat memberikan kebahagiaan hakiki bagi manusia. Kebahagiaan yang bersumber dari suatu hal yang sangat variatif dan dinamis tidak hanya dipengaruhi oleh faktor tunggal, yaitu pendapatan.

Fokus masalah yang diteliti dalam skripsi ini adalah: 1) Bagaimana pengembangan pariwisata halal di pulau Bali dalam konsep ekonomi pembangunan Islam? Tujuan penelitian ini adalah: 1) Menganalisis dan mengidentifikasi pengembangan pariwisata halal di pulau Bali dalam konsep ekonomi pembangunan Islam.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, menganalisis dan mengidentifikasi pengembangan pariwisata halal di pulau Bali dalam konsep ekonomi pembangunan Islam. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Peneliti menggunakan lima indikator untuk mengidentifikasi dan menganalisis potensi pengembangan pariwisata halal di pulau Bali dalam konsep ekonomi pembangunan Islam. Hasil dari penelitian yang telah dilakukan yaitu: 1) Daya tarik yang dimiliki pariwisata halal di pulau Bali ialah sertifikasi halal MUI terhadap makanan maupun minuman yang dikonsumsi oleh wisatawan. 2) Akomodasi bagi wisatawan Muslim khususnya fasilitas ibadah, sudah tersedia di berbagai destinasi wisata Bali. 3) Transportasi di berbagai destinasi wisata sebagai akses yang memudahkan wisatawan tersedia dengan baik serta sudah terdapat izin yang diatur oleh biro perjalanan. 4) Fasilitas pendukung bagi para wisatawan mampu melengkapi segala kebutuhan mendesak yang diperlukan, seperti contohnya obat-obatan, maupun klinik, rumah sakit terdekat. Serta tempat penukaran mata uang asing bagi wisatawan asing. 5) Kelembagaan yang mengatur mengenai pariwisata halal di Bali tidak terdapat regulasi pemerintah secara resmi.

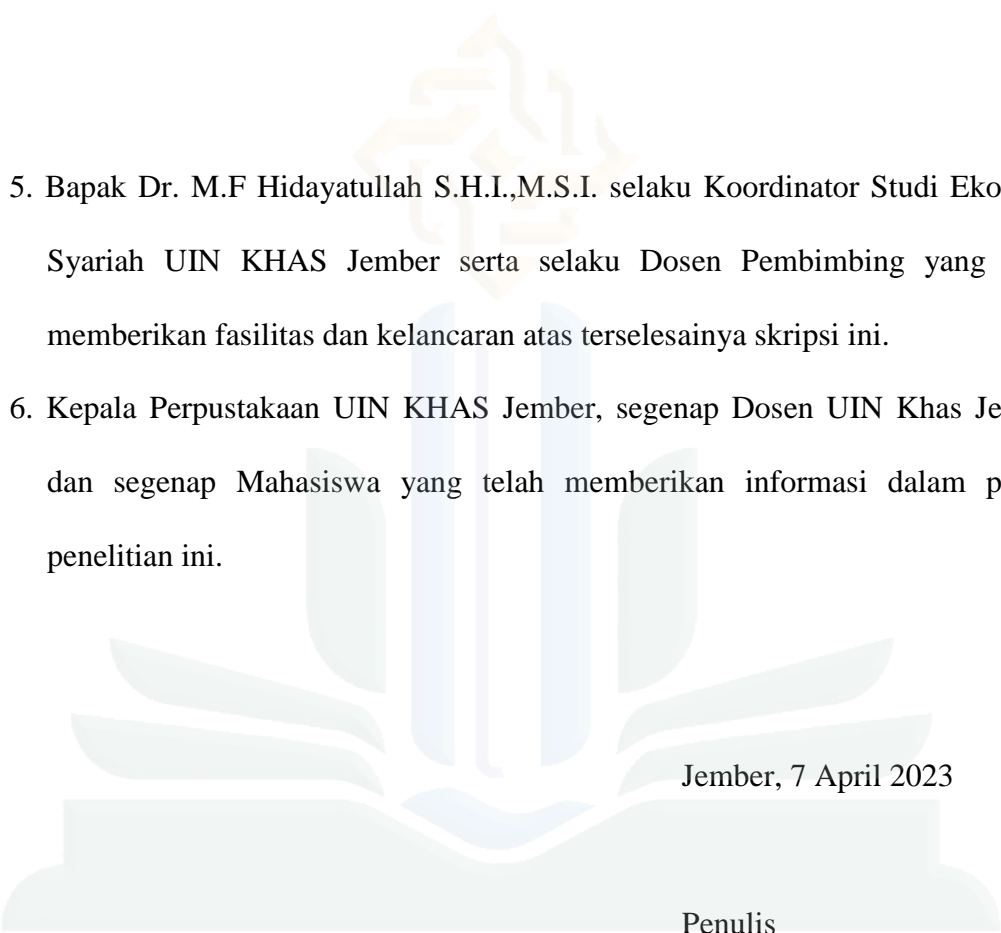
KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segenap puji syukur penulis sampaikan kepada Allah karena atas Rahmat dan karunia-Nya, perencanaan, pelaksanaan, dan penyelesaian skripsi sebagai salah satu syarat menyelesaikan program sarjana, dapat terselesaikan dengan lancar.

Kesuksesan ini dapat penulis karena dukungan banyak pihak. Oleh karena itu, penulis menyadari dan menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., M.M selaku Rektor UIN KHAS Jember yang telah memberikan segala fasilitas yang membantu kelancaran atas terselenggaranya skripsi ini.
2. Bapak Dr. Khamdan Rifa'i S.E.,M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN KHAS Jember yang telah memberikan segala fasilitas yang membantu kelancaran atas terselenggaranya skripsi ini.
3. Bapak Dr. Abdul Rokhim, S.Ag.,M.E.I selaku Wakil Dekan Bidang Akademik UIN KHAS Jember yang telah memberikan segala fasilitas sehingga terselesainya skripsi ini.
4. Ibu Dr. Nikmatul Masruroh, S.H.I.,M.E.I selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam UIN KHAS Jember yang telah memberikan segala fasilitas atas kelancaran skripsi ini.

- 
5. Bapak Dr. M.F Hidayatullah S.H.I.,M.S.I. selaku Koordinator Studi Ekonomi Syariah UIN KHAS Jember serta selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan fasilitas dan kelancaran atas terselesainya skripsi ini.
 6. Kepala Perpustakaan UIN KHAS Jember, segenap Dosen UIN Khas Jember dan segenap Mahasiswa yang telah memberikan informasi dalam proses penelitian ini.

Jember, 7 April 2023

Penulis

UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

**KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER**

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Peneletian.....	10
E. Definisi Istilah	11
F. Sistematika Pembahasan.....	14
BAB II KAJIAN KEPUASTAKAAN.....	16
A. Penelitian Terdahulu	16
B. Kajian Teori	23
BAB III METODE PENELITIAN	52
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	52
B. Lokasi Penelitian	52
C. Subyek Penelitian	53
D. Teknik Pengumpulan Data.....	53
E. Analisis Data.....	56
F. Keabsahan Data	58

G. Tahap-tahap Penelitian.....	58
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	60
A. Gambaran Obyek Penelitian	60
B. Penyajian Data dan Analisis	63
C. Pembahasan Temuan.....	73
BAB V PENUTUP.....	78
A. Simpulan	78
B. Saran-saran	78
DAFTAR PUSTAKA.....	80
Pernyataan Keaslian Penulisan	
Lampiran-lampiran yang berisi:	
1. Matrik Penelitian	
2. Formulir Pengumpulan Data	
3. Foto	
4. Gambar/Denah	
5. Surat Keterangan (izin penelitian dan lain-lain)	
6. Biodata Penulis	

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

DAFTAR TABEL

1.1 Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu.....21



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

DAFTAR GAMBAR

2.1 Gambar Denah Dinas Pariwisata Provinsi Bali	60
3.1 Gambar Struktur Organisasi Dinas Pariwisata Provinsi Bali.....	63
4.1 Gambar Hasil Dokumentasi dari Dinas Pariwisata Provinsi Bali	65
5.1 Gambar Restaurant dan Hotel The Rhadana Kuta	68
6.1 Gambar Hasil Observasi di Destinasi Wisata Kintamani	69



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Perkembangan industri halal terus menunjukkan peningkatan seiring semakin banyaknya masyarakat muslim yang melakukan hijrah kepada gaya hidup halal. Kesadaran halal tidak lagi hanya pada produk makanan dan minuman, tetapi telah berevolusi ke sektor keuangan (*finance*), farmasi, *fashion*, media dan rekreasi serta pariwisata.

Pariwisata halal sebagai sebuah fenomena baru dalam berwisata terus mengalami peningkatan seiring meningkatnya jumlah wisatawan Muslim di seluruh dunia. Wisatawan Muslim dalam menentukan tujuan dan akomodasi perjalanan wisata mereka akan sering mempertimbangkan unsur halal (sesuatu yang diizinkan atau dibolehkan menurut ajaran Islam). Hal ini dikarenakan dalam setiap tindakannya wisatawan Muslim ini mendasarkan pada Al-Quran dan Hadist, termasuk dalam berwisata².

Istilah wisata halal sudah menjadi *trend* di berbagai dunia seiring perkembangan teknologi yang berkembang sangat cepat. Istilah wisata halal dalam literatur pada umumnya disamakan dengan beberapa istilah seperti *syariah tourism*, *Islamic tourism*, *halal friendly tourism destination*, *halal travel*, *halal lifestyle*, *friendly travel destination*. Dari

² Ujang Suyatman, dan Ruminda, "Pengembangan Muslim Friendly Tourism dalam Konsep Pariwisata Budaya di Pulau Dewata". *Penelitian Terapan Pengembangan Nasional*, UIN Sunan Gunung Djati Bandung (2019) : 2.

sisi industri, wisata halal merupakan suatu produk pelengkap dan tidak menghilangkan jenis pariwisata konvensional. Sebagai cara baru untuk mengembangkan pariwisata Indonesia yang menjunjung tinggi budaya dan nilai-nilai Islami tanpa menghilangkan keunikan dan orisinalitas daerah.³

Pariwisata halal bukan hanya sebatas adanya makanan halal, tetapi yang lebih penting adalah tersedianya akomodasi, lingkungan dan pelayanan yang ramah Muslim, yaitu semua komponen yang memudahkan dan memberi kenyamanan bagi wisatawan Muslim untuk melaksanakan ibadahnya.⁴

Wisata halal mengedepankan produk-produk halal dan aman dikonsumsi turis Muslim. Namun, bukan berarti turis non-Muslim tidak bisa menikmati wisata halal. Dalam menerapkan wisata halal di Indonesia yang di *launching* pada tahun 2014, Kementerian Pariwisata bekerja sama dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk menentukan standar halal bagi produk-produk pariwisata. MUI dan Kemenpar menjamin, sertifikasi halal ini tidak hanya bisa dimanfaatkan oleh wisatawan Muslim. Dalam wisata halal, destinasi yang ditunjuk wajib menyediakan makanan halal, memberikan akses yang mudah untuk ibadah, dan juga akomodasi, serta pelayanan yang sesuai standar

³ Muhammad Nizar, "Tinjauan Wisata Halal Perspektif Maqosidus Syariah Terkait Fatwa Dsn-Mui No. 08 Tahun 2016", Universitas Yudharta Pasuruan, *Jurnal Istiqro* 6 No.1 (2020) : 97-98.

⁴ Riska Destiana, dan Retno Sunu Astuti, "Pengembangan Pariwisata Halal di Indonesia", Conference on Public Administration and Society, *Jurnal Collaborative Governance dalam Pengembangan Parwisata di Indonesia* 01 No. 01 (2019) : 333.

syariah. Kementerian Pariwisata meluncurkan wisata halal di Indonesia dengan tujuan menjadikan Indonesia sebagai destinasi yang ramah bagi turis Muslim. Bukan hanya destinasi wisata, fasilitas penunjangnya juga harus sesuai standar halal dari MUI. Karena itu, wisata halal perlu dilakukan dan digerakkan pada para pemangku wisata agar bisa membawa wisatawan Muslim ke tempat yang ramah Muslim dan sesuai syariah.⁵

Berdasarkan perspektif industri, wisata halal dilihat sebagai suatu produk pelengkap dari pariwisata konvensional. Sebuah pendekatan baru dalam mengembangkan pariwisata yang berprinsip pada integrasi nilai kearifan lokal dan nilai Islami tanpa mengesampingkan keunikan dan keaslian budaya sebagai daya tarik wisata. Terminologi wisata halal seringkali disamakan dengan wisata religi, padahal keduanya memiliki makna yang berbeda. Wisata halal memiliki jangkauan makna yang lebih luas terutama pada target pasar yang tidak hanya pada wisatawan Muslim tetapi juga pada wisatawan non-Muslim. Pariwisata halal mulai diminati secara global karena karakteristik dari produk, jasa maupun tujuan pengembangannya selama tidak bertentangan dengan nilai dan etika bisnis syariah.⁶

Bagi wisatawan Muslim, halal adalah gaya hidup, sedangkan untuk wisatawan Non-muslim terkait dengan kualitas produk meliputi

⁵ Heni Noviarita, dan Muhammad Kurniawan, "Analisis Halal Tourism dalam Meningkatkan Laju Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Lampung", UIN Raden Intang Lampung, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7 No. 01 (2021) : 3.

⁶ Fadhil Surur, *Wisata Halal : Konsep dan Aplikasi* (Samata, Kabupaten Gowa: UPT Perpustakaan UIN Alauddin, 2020), 28.

kualitas kebersihan, keamanan dan rantai pasok. Banyak negara non-Islam memahami bahwa pariwisata halal bukanlah wisata Islami. Mereka memahami bahwa itu hanya strategi untuk memenuhi kebutuhan pengunjung Muslim, bukan strategi untuk merusak nilai-nilai atau tradisi agama setempat. Mereka menyadari potensi pasar Muslim yang kuat, yang tidak bijaksana untuk dilewatkan dalam arti bisnis.⁷

Islam sangat menganjurkan umatnya untuk bepergian, karena dalam hal tersebut setidaknya ada tiga manfaat yaitu mendapatkan ilmu baru, mendapat saudara baru dan terbukanya pintu rezeki. Dengan kata lain, meskipun dalam keadaan sedang berwisata umat Muslim tidak melupakan bahwasannya memiliki pandangan hidup yang didasarkan pada tiga konsep fundamental, yaitu *tauhid* (ke-esaan Allah), *khalifah*, dan *adl* (keadilan).

Wisata halal merupakan salah satu bentuk wisata yang berbasis budaya dengan mengutamakan nilai-nilai dan norma syariat Islam sebagai pondasi utama. Dalam pariwisata halal sendiri terdapat lima indikator didalamnya yaitu: *attractions* (daya tarik), *amenity* (fasilitas), *accessibility* (aksebilitas), *ancillary sevices* (fasilitas pendukung), *institutions* (kelembagaan).⁸ Siklus industri pariwisata yang masih

⁷ Sari Raudhatul Jannah, "Analisis Pengaruh Image Destinasi Wisata Halal, Atraksi Budaya dan Aksebilitas Terhadap Kepuasan Wisatawan Domestik di Aceh" (Tesis, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2022), 4.

⁸ Susie Suryani dan Nawarti Bustamam, "Potensi Pengembangan Pariwisata Halal dan Dampaknya Terhadap Pembangunan Ekonomi Daerah Provinsi Riau", Universitas Islam Riau, *Jurnal Ekonomi KIAT* 32 No. 2 (Desember 2021) : 153-154.

dalam fase pengembangan, tentunya membutuhkan gagasan yang lebih mutahir dan internalisasi pemahaman secara menyeluruh terhadap integrasi nilai-nilai Islam pada seluruh tahapan kegiatan pariwisata. Wisata halal terus mengalami perkembangan dan menghadapi tantangan tren teknologi dan informasi.⁹ Hal ini menjadi penting dalam menggambarkan dampak dari perkembangan pariwisata kedalam pembangunan manusia, pada hal yang sama dalam respon pertumbuhan ekonomi pembangunan manusia telah menjadi isu yang menarik untuk dikaji. Hubungan antara pembangunan manusia dengan pertumbuhan ekonomi disuatu wilayah dilakukan pembuktian bukan hanya secara teoritis, tetapi juga empiris, dalam rangka mengukur kontribusi pendapatan secara nyata suatu daerah.

Berdasarkan pandangan ini, poin penting dalam pembangunan adalah bagaimana menciptakan tatanan kehidupan yang dapat memberikan kebahagiaan hakiki bagi manusia. Kebahagiaan yang bersumber dari suatu hal yang sangat variatif dan dinamis tidak hanya dipengaruhi oleh faktor tunggal, yaitu pendapatan. Beberapa kajian dan teori yang mengemukakan bahwa dalam jangka panjang ternyata peningkatan *income* per kapita sebuah negara tidak berbanding lurus dengan peningkatan rata-rata angka kebahagiaan (*happiness*).¹⁰

⁹ Fadhil Surur, *Wisata Halal : Konsep dan Aplikasi* (Samata, Kabupaten Gowa: UPT Perpustakaan UIN Alauddin, 2020), 28.

¹⁰ A. Jajang W. Mahri, *Ekonomi Pembangunan Islam* (Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah-Bank Indonesia, 2021), 5-6.

Bali dan pariwisata tidak bisa dipisahkan. Sebagai daerah tujuan wisata utama, kekayaan dan keindahan alam, serta keunikan seni budayanya menjadi daya tarik utama. Bali tidak hanya terkenal di dalam negeri tetapi diluar negeri juga. Bali ini memiliki julukan pulau Dewata karena memiliki kekhasan yang dipengaruhi oleh adat istiadat yang dimiliki cukup unik. Oleh karena itu, sektor pariwisata menjadi andalan bukan hanya oleh Pemerintah Provinsi Bali, tetapi juga seluruh lapisan masyarakatnya banyak berharap dari sektor jasa ini. Faktor yang menyebabkan Bali sebagai daerah tujuan wisata andalan di Indonesia, karena memiliki kekhasan pada objek wisatanya, baik wisata alam maupun wisata budaya. Selain itu, didukung pula oleh sarana dan prasarana pariwisata yang lengkap. Oleh karena itu, pemerintah tidak melewatkan kesempatan untuk dijalkannya potensi pengembangan pariwisata Halal, dengan begini wisatawan akan lebih banyak dan bervariasi dari berbagai kalangan. Di Bali juga terdapat beberapa destinasi wisata ramah Muslim antara lain yakni : *Masjid Agung Ibnu Baitutah (Puja Mandala)*, *Kampung Gelgel*, *The Rhadana Kuta*, *Hotel dan Restoran Bayt Kaboki*. Masjid agung ibnu baitutah merupakan bagian simbol-simbol kerukunan tempat ibadah dari Nusa Dua Bali. Masjid ini berdiri dengan megah di pelataran bukit Kampial Nusa Dua, berdiri berdampingan dengan empat sarana ibadah umat beragama lain, yakni Pura Jagat Natha bagi umat Hindu, Vihara Budina Ghuna untuk umat Budha, dan Gereja Bunda Maria Segala Bangsa untuk umat

Katolik serta Gereja Kristen Bukit Do'a untuk umat Protestan. Keunikan masjid agung sendiri yaitu terdapat berbagai koleksi antik milik masjid, seperti bedug lama dan Al-Qu'an yang ditulis tangan. Proses terbentuknya komunitas Islam di kampung Gelgel berawal dari kedatangan orang-orang Jawa utusan Hayam Wuruk, Raja Majapahit, yang ditugasi mengantarkan kembali Dalem Ketut Ngelesir (1380-1460) setelah mengadakan konferensi kerajaan-kerajaan vasal (taklukan) di seluruh Nusantara. Di wilayah ini terdapat peninggalan sejarah berupa Masjid Nurul Huda, Babad, Tari Rudat, Pintu Menara, Mimbar, dan Makam. Keunikan dari hotel bintang empat yang dikembangkan oleh *Rhadana Hospitality Development* yaitu menjadi hotel *Muslim Friendly* modern pertama dengan sertifikat MUI. Di masing-masing kamar pun terdapat Al-Qur'an dengan tiga bahasa, sajadah, mukenah, dan sarung. Di samping itu, juga tersedia musholla yang cukup luas dengan gambar ka'bah. Bayt Kaboki dibangun pada 2013, sebagai hotel pertama yang mengusung konsep syariah atau halal di Bali. Bayt Kaboki merupakan hotel yang sangat menghargai pentingnya institusi keluarga, sehingga hanya mengizinkan mereka yang terikat hubungan pernikahan atau keluarga untuk menginap. Sebagai hotel keluarga, Bayt Kaboki tidak menyediakan maupun mengizinkan minuman beralkohol. Serta menu makanan dipilih dari sumber yang terbaik dan terjamin kehalalannya.¹¹

¹¹ Ujang Suyatman, dan Ruminda, "Pengembangan Muslim Friendly Tourism dalam

Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, tahun 2019 jumlah kedatangan wisatawan asing ke Bali masih normal yaitu 6.275.210 wisatawan. Namun seiring dengan penyebaran Covid-19 ke Bali pada tahun 2020, pariwisata Bali mulai merasakan dampaknya yang dapat dilihat dari penurunan jumlah kunjungan wisatawan asing ke Bali, yaitu 1.069,473 orang. Angka kunjungan wisatawan ke Bali merosot drastis hingga 82,96%. Mulai Juli 2020, sesuai hasil konsultasi dengan Pemerintah Pusat, pemerintah Bali membuka kembali pariwisata Bali di masa pandemi khususnya untuk wisatawan lokal Bali dan nusantara agar pariwisata hidup dan bergairah kembali. Kebijakan penting lain yang diambil dalam upaya pemulihan pariwisata adalah tentang standar kesehatan yang wajib diterapkan oleh penyedia jasa pariwisata untuk memberikan rasa nyaman kepada para pengunjung yang sedang berlibur.¹²

Selain pemberian layanan yang memuaskan konsumennya, pemerintah dan masyarakat Bali juga menerapkan prinsip pembangunan pariwisata berkelanjutan (*sustainability tourism development*), yakni dengan menerapkan falsafah Tri Hita Karana (THK), yakni selarasnya hubungan antar sesama manusia (*pawongan*), hubungan antara manusia dengan lingkungan hidup (*palemahan*), serta hubungan antara manusia dengan Tuhannya (*parahyangan*).

Konsep Pariwisata Budaya di Pulau Dewata”. *Penelitian Terapan Pengembangan Nasional*, UIN Sunan Gunung Djati Bandung (2019) : 107-128.

¹² I Nengah Subadra, “Pariwisata Budaya dan Pandemi Covid-19: Memahami Kebijakan Pemerintah dan Reaksi Masyarakat Bali”, Universitas Udayana, *Jurnal Kajian Bali* 11 NO. 01 (April 2021) : 2.

Penegakan prinsip THK amat berarti bagi upaya pembangunan pariwisata budaya Bali yang berkelanjutan. Menurut I Wayan Ardika, paradigma pariwisata budaya berkelanjutan meliputi : terpeliharanya mutu sumber daya alam dan budaya, meningkatnya kesejahteraan masyarakat lokal, dan terwujudnya kepuasan wisatawan.¹³

Dari penelitian sebelumnya, secara umum *stakeholders* pariwisata di Bali menolak Bali untuk dijadikan sebagai daerah tujuan wisata dengan konsep pariwisata halal. Alasan utama penolakan-penolakan itu terkait dengan keberlangsungan atau *sustainability* pariwisata Bali yang terkenal dengan konsep pariwisata budayanya.¹⁴ Akan tetapi, berdasarkan hasil observasi peneliti melihat fenomena bahwa sebenarnya pariwisata Bali dapat menerima konsep Pariwisata halal jika hal tersebut adalah permintaan dari wisatawan Muslim dengan tidak menghilangkan budaya asli Bali. Artinya, pariwisata halal bukan berarti destinasi wisata harus halal melainkan pelayanan yang harus mengikuti syariat Islam dengan tidak menghilangkan budaya asli yang dimiliki oleh Bali.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik dan bermaksud untuk melakukan penelitian yang akan dilakukan di Dinas Pariwisata Provinsi Bali guna mengetahui

¹³ Ni Md. Anggita S Mahadewi, "Analisis Media Berita Online Tentang Pengembangan Wisata Syariah di Pulau Bali dalam Kajian Sosiologi Pembangunan", Universitas Udayana, *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 7 No. 1 (2018) : 4.

¹⁴ Ujang Suyatman, dan Ruminda, "Pengembangan Muslim Friendly Tourism dalam Konsep Pariwisata Budaya di Pulau Dewata". *Penelitian Terapan Pengembangan Nasional*, UIN Sunan Gunung Djati Bandung (2019) : 1.

pengembangan pariwisata halal di Pulau Bali dengan konsep ekonomi pembangunan Islam dengan mengambil judul “ANALISIS POTENSI PENGEMBANGAN PARIWISATA HALAL DI PULAU BALI DALAM KONSEP EKONOMI PEMBANGUNAN ISLAM”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu :
Bagaimana potensi pengembangan pariwisata halal di Pulau Bali dalam konsep ekonomi pembangunan Islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk : Menganalisis dan mengidentifikasi potensi pengembangan pariwisata halal di pulau Bali dalam konsep ekonomi pembangunan Islam.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Akademis

Sebagai bahan masukan yang bermanfaat dalam kemajuan studi dan perkembangan Ilmu Ekonomi khususnya di bidang Pariwisata.

2. Bagi Dinas Pariwisata Provinsi Bali

Penelitian ini dapat membantu sumbangan pemikiran untuk mengembangkan potensi pariwisata halal yang lebih baik lagi.

3. Bagi Peneliti

Dapat digunakan sebagai dasar untuk peneliti yang lebih lanjut, terutama berkaitan dengan pengembangan pariwisata halal, juga sebagai referensi dalam meneliti dan mengkaji dalam lagi untuk pembahasan yang sama.

E. Definisi Istilah

Untuk menghindari kekeliruan dan kesalah pahaman, peneliti berusaha menjelaskan istilah yang terkandung dalam “Analisis Potensi Pengebambangan Pariwisata Halal Di Pulau Bali Dalam Konsep Ekonomi Pembangunan Islam”. Dengan adanya penjelasan yang terkandung dalam istilah judul tersebut diharapkan dapat menghilangkan kesalah pahaman pembaca dalam menentukan kajian selanjutnya. Adapun istilah-istilah yang perlu mendapat penjelasan adalah sebagai berikut :

1. Pengembangan Pariwisata Halal

Awal mula konsep wisata syariah di Indonesia sejatinya mulai diperkenalkan pada tahun 1975 sejalan dengan pembentukan Majelis Ulama Indonesia menjadi pionir dalam sertifikasi halal di Indonesia khususnya bidang makanan. Selanjutnya pada tahun 2012 pemerintah merilis panduan wisata syariah. Secara resmi konsep wisata halal di Indonesia diperkenalkan pada tahun 2013 melalui acara Indonesia Halal Expo (*Indhex*) pada tanggal 30 Oktober- 2 November 2013 di JIExpo Kemayoran Jakarta. Pemerintah mencanangkan 13 destinasi wisata syariah di Indonesia yaitu NTB, Nanggore Aceh Darussalam, Lampung, Jawa Tengah, Banten,

Sumatera Barat, Riau, DKI Jakarta, Jawa Barat, Yogyakarta, Jawa Timur, Sulawesi Selatan dan Bali. Sejalan dengan perkembangan ekonomi syariah di Indonesia, sektor wisata halal juga mulai mengalami perkembangan. Tahun berikutnya jaminan hukum untuk produk halal telah disahkan. Hal ini semakin mempertegas langkah pemerintah untuk mengembangkan wisata halal. Pada tahun 2016 Majelis Ulama Indonesia melalui Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 108/DSN-MUI/X/20161 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah dan pada tanggal 11 Oktober 2017 Menteri Agama secara resmi meresmikan terbentuknya Badan Penyelenggara Produk Halal (BPJPH) sebagai amanat dari Undang-undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.¹⁵

2. Ekonomi Pembangunan Islam

Ada beberapa implikasi terhadap karakteristik dalam ekonomi pembangunan Islam yang dilandasi oleh prinsip ini. *Aksioma pertama* menyiratkan bahwa spirit dari ekonomi pembangunan Islam tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat duniawi tetapi juga untuk mencapai kepentingan yang bersifat *ukhrawi*. Segala yang dilakukan atas dasar kepercayaan kepada Allah. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa yang dicapai oleh pembangunan Islam tidak hanya yang bersifat fisik atau material tetapi juga spiritual. *Aksioma kedua* menuntun agar ekonomi pembangunan Islam tidak

¹⁵ Fadhil Surur, *Wisata Halal : Konsep dan Aplikasi* (Samata, Kabupaten Gowa: UPT Perpustakaan UIN Alauddin, 2020), 163-164.

hanya mengarahkan pembangunan yang bersifat individual, tetapi juga kelompok, pembangunan yang tidak menciptakan ketimpangan dan menjunjung tinggi keadilan. Selain itu, aksioma ini juga menyiratkan bahwa ekonomi pembangunan Islam memprioritaskan pembangunan yang bersifat *daruriyat*, yaitu pembangunan yang pro terhadap kaum lemah, kelompok masyarakat yang memiliki keterbatasan. Aksioma ini juga mengarahkan agar dimensi pembangunan di dalam Islam lebih komprehensif yang tidak hanya bermanfaat bagi manusia, tetapi juga makhluk lain dan lingkungan sekitar. Sementara itu, dari *aksioma ketiga (free will)* menunjukkan bahwa dalam proses pembangunan harus ada sebuah proses pengendalian yang dilakukan oleh manusia selaku objek sekaligus subjek dari pembangunan. Di dalam prinsip ekonomi Islam kelangkaan (*scarcity*) bukanlah masalah utama, tetapi yang menjadi masalah adalah penyebab dari kelangkaan tersebut. Kelangkaan dalam ekonomi Islam dapat dibagi dua, yaitu kelangkaan absolut dan kelangkaan relatif. Kelangkaan relatif ini mempercayai bahwa pada dasarnya apa yang diciptakan di dunia ini adalah cukup, tetapi yang membuatnya menjadi langka adalah ketamakan manusia.

Selain karena ketamakan, kelangkaan juga terjadi karena keterbatasan manusia dalam mengeksplorasi dan mendistribusikan sumber daya secara adil terhadap manusia lainnya dan dalam periode waktu. Pengendalian pembangunan yang memperhatikan aspek

inilah yang sering disebut sebagai pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). Aksioma yang keempat menyiratkan bahwa pembangunan dalam Islam merupakan sebuah bentuk dari tanggung jawab manusia selaku subjek dan objek dari pembangunan. Dimana tanggung jawab ini bukan hanya sebatas untuk menjamin keberlangsungan hidupnya, tetapi juga memastikan keberlangsungan hidup bermasyarakat yang merupakan wujud penghambaan diri manusia sebagai *khalifah* di muka bumi. Aksioma ini mendorong agar pembangunan yang dilakukan tidak bersifat individualis dan memperhatikan kepentingan bersama dan mengikuti arahan yang diperintahkan oleh Allah Swt¹⁶.

F. Sistematika Pembahasan

Penataan pembahasan yang digunakan pada penulisan skripsi ini merujuk pada buku panduan penulisan skripsi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember meliputi :

Bab pertama atau pendahuluan membahas terkait konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan sistematika pembahasan.¹⁷

Bab kedua atau kajian keperustakaan membahas mengenai penelitian terdahulu dan kajian teori.¹⁸

¹⁶ A. Jajang W. Mahri, *Ekonomi Pembangunan Islam* (Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah-Bank Indonesia, 2021), 14-15.

¹⁷ *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN, 2019) 90-91.

¹⁸ *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN, 2019) 91.

Bab ketiga atau metode penelitian membahas mengenai pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, tahap-tahap penelitian.¹⁹

Bab ke empat atau penyajian data dan analisis membahas mengenai gambaran obyek penelitian, penyajian data dan analisis, dan pembahasan temuan.²⁰

Bab lima atau penutup pada bab ini membahas mengenai kesimpulan yang didapatkan pada bab sebelumnya dan saran-saran.²¹

UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

¹⁹ *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN, 2019) 91-93.

²⁰ *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN, 2019) 93-94.

²¹ *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN, 2019) 93-94.

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Di dalam penelitian ini, terdapat sepuluh hasil penelitian yang dapat menjadi referensi untuk mengetahui tingkat orisinalitas penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

1. Penelitian Ujang Suyatman dan Ruminda, yang berjudul “Pengembangan Muslim Friendly Tourism dalam Konsep Pariwisata Budaya di Pulau Dewata”. Penelitian ini membahas konsep pariwisata yang dikembangkan Kepariwisataan Provinsi Bali terhadap wacana pengembangan pariwisata halal di Pulau Bali. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil dari penelitian ini yaitu pariwisata di Bali menolak untuk dijadikan sebagai daerah tujuan wisata dengan konsep pariwisata halal. Alasan utama penolakan-penolakan itu terkait dengan keberlangsungan pariwisata Bali yang terkenal dengan konsep pariwisata budayanya.²²
2. Rifky Setiawan dan Muhammad Mirza Pahlevi, yang berjudul “Potensi Perkembangan Halal Food di Denpasar Bali”. Penelitian ini membahas tentang kata Halal dan sebagian aktivitas yang berkaitan dengan pariwisata Halal. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan. Hasil penelitian ini yakni wisata Halal di Bali sebenarnya sudah berpotensi memiliki peluang bagi stakeholder

²² Ujang Suyatman, dan Ruminda, “Pengembangan Muslim Friendly Tourism dalam Konsep Pariwisata Budaya di Pulau Dewata”. UIN Sunan Gunung Djati Bandung (2019) : 131.

pemerintahan maupun masyarakat sekitar, hanya saja budaya masyarakat Bali yang bertentangan dari konsep Halal menjadi tantangan dalam mengembangkan wisata Halal di Bali.²³

3. Penelitian Heni Noviarita dan Muhammad Kurniawan, yang berjudul “Analisis Halal Tourism dalam Meningkatkan Laju Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Lampung”. Penelitian ini membahas potensi Provinsi Lampung untuk menjadi wisata syariah dengan penilaian empat aspek yang ada di objek wisata yang meliputi atraksi, amenitas, aksesibilitas dan *ancillary*. Metode yang digunakan ialah kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Provinsi Lampung memiliki peluang dalam Halal Tourism dikarenakan belum adanya wisata syariah di daerah Lampung dan menjawab kebutuhan masyarakat Muslim akan pariwisata syariah dengan demikian ekonomi masyarakat sekitar akan meningkat yang berdampak pada pendapatan daerah.²⁴
4. Penelitian Susi Suryani dan Nawarti Bustamam, yang berjudul “Potensi Pengembangan Pariwisata Halal dan Dampaknya Terhadap Pembangunan Ekonomi Daerah Provinsi Riau”. Penelitian ini membahas destinasi pariwisata halal yang dimiliki Riau, hal tersebut dilihat dari jenis usaha di lokasi objek wisata. Metode penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan analisis deskriptif. Hasil

²³ Rifky Setiawan dan Muhammad Mirza Pahlevi, “Potensi Perkembangan Halal Food di Denpasar Bali”, Universitas Nasional, *Jurnal Ilmiah Pariwisata* 19 No. 1 (2023) : 35-36.

²⁴ Heni Noviarita dan Muhammad Kurniawan, “Analisis Halal Tourism dalam Meningkatkan Laju Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Lampung”, UIN Raden Intan Lampung, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7 No. 1 (2021) : 8.

penelitian ini terlihat bahwa dengan kekuatan branding “Home Land of Melayu” provinsi Riau memang sangat pantas dan memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi destinasi pariwisata halal.²⁵

5. Penelitian Ida Nurlatifah, yang berjudul “Kebijakan Pengembangan Pariwisata Halal di Indonesia : Peluang, Tantangan, dan Strategi”. Penelitian ini membahas strategi prioritas yang digunakan dalam mengembangkan pariwisata halal di Indonesia. Penelitian ini menggunakan teknik analisis SWOT dengan menggunakan metode AHP (*Analytic Hierarchy Process*). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa industri pariwisata menjadi sarana untuk menjaga dan memperbaiki lingkungan serta mendorong pembangunan ekonomi regional.²⁶
6. Penelitian Prananda Firdaus, yang berjudul “Pengaruh Pariwisata Halal Terhadap Loyalitas Wisatawan Muslim Untuk Mengunjungi Bali”. Penelitian ini membahas persepsi nilai halal berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas wisatawan Muslim yang berkunjung ke Bali. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi nilai halal, kepuasan wisatawan di Bali berpengaruh positif signifikan terhadap loyalitas wisatawan Muslim yang berkunjung di Bali.²⁷

²⁵ Susi Suryani dan Nawarti Bustamam, “Potensi Pengembangan Pariwisata Halal dan Dampaknya Terhadap Pembangunan Ekonomi Daerah Provinsi Riau”, Universitas Islam Riau, *Jurnal Ekonomi KIAT* 32 No. 2 (Desember 2021) : 158.

²⁶ Ida Nurlatifah, “Kebijakan Pengembangan Pariwisata Halal di Indonesia : Peluang, Tantangan, dan Strategi” (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020), 33.

²⁷ Prananda Firdaus, “Pengaruh Pariwisata Halal Terhadap Loyalitas Wisatawan Muslim Untuk Mengunjungi Bali” (Skripsi, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2022), 32.

7. Penelitian Amalia Fiqia Wandhini dan Astri Dwi Dayanti, yang berjudul “Halal Tourism In Bali : Pengaruh dan Tantangan Mengembangkan Wisata Halal di Bali”. Penelitian ini membahas peran wisatawan atau pariwisata halal di Bali dengan mayoritas Agama Hindu dan budayanya yang sangat kuat. Dengan penduduk Muslim disana lebih sedikit hanya 30%. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa istilah wisata halal merupakan jawaban terhadap pandangan miring, dan tidak produktif pada dunia wisata.²⁸
8. Penelitian Naufal Achmad Maulana, yang berjudul “Regulasi Pariwisata Halal di Provinsi Bali (Studi Regulasi dalam Praktek Wisata)”. Penelitian ini membahas bagaimana hukum pariwisata halal di Indonesia. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif dan empiris yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dengan beberapa pendekatan yaitu pendekatan undang-undang, pendekatan fatwa DSN MUI, dan wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa saat ini pariwisata halal belum memiliki landasan hukum yang jelas, yang mengatur khusus tentang penyelenggaraan pariwisata halal. Namun demikian, saat ini pemerintah menggunakan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan.²⁹

²⁸ Amalia Fiqia Wandhini dan Astri Dwi Dayanti, “Halal Tourism In Bali : Pengaruh dan Tantangan Mengembangkan Wisata Halal di Bali”, IAIN Salatiga, *Jurnal Ekonomi Syariah* 2 No. 2 (Oktober 2019) : 4.

²⁹ Naufal Achmad Maulana, “Regulasi Pariwisata Halal di Provinsi Bali (Studi Terhadap Regulasi dalam Praktek Wisata)” (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022), 67.

9. Penelitian Inten Eqa Saputri, yang berjudul “Analisis Potensi Pengembangan Wisata Halal Sebagai Lapangan Kerja Baru Untuk Peningkatan Ekonomi Masyarakat (Studi Objek Wisata Pantai Seruni Bantaeng)”. Penelitian ini membahas kondisi ekonomi masyarakat pantai seruni dengan adanya pengembangan wisata halal. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa potensi pengembangan syariah yang ada di Pantai Seruni diantaranya terdapat makanan halal dengan logo halal MUI, proses pengolahan makanan dan minuman yang mengikuti aturan Islam dan tidak ada minuman beralkohol yang diperjual belikan.³⁰

10. Penelitian Salman Nasution, yang berjudul “Konsep Pariwisata Halal Berbasis Ekonomi Kreatif Dengan Sharia Regulation dalam Meningkatkan Pendapatan dan Kesejahteraan Masyarakat di Sumatera Utara”. Dalam penelitian ini secara langsung maupun tidak langsung, pengembangan konsep antara pariwisata halal dengan ekonomi kreatif akan mensikronkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Metode yang digunakan ialah kualitatif.³¹

³⁰ Inten Eqa Saputri, “Analisis Potensi Pengembangan Wisata Halal Sebagai Lapangan Kerja Baru Untuk Peningkatan Ekonomi Masyarakat (Studi Obyek Wisata Pantai Seruni Bantaeng)” (Skripsi, Universitas Muhammdiyah Makassar, 2020), 33.

³¹ Salman Nasution, “Konsep Pariwisata Halal Berbasis Ekonomi Kreatif Dengan Sharia Regulation dalam Meningkatkan Pendapatan dan Kesejahteraan Masyarakat di Sumatera Utara”, Universitas Muhammdiyah Sumatera Utara, *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis* 21 No. 2 (2021) : 259.

Tabel 1.1
Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Ujang Suyatman, dan Ruminda, UIN Sunan Gunung Djati 2019.	Pengembangan Muslim Friendly Tourism dalam Konsep Pariwisata Budaya di Pulau Dewata.	Membahas pengembangan muslim friendly tourism, penelitian yang sama di Pulau Dewata.	Penelitian ini menggunakan konsep ekonomi pembangunan Islam, sedangkan peneliti terdahulu menggunakan konsep pariwisata budaya.
2	Rifky Setiawan dan Muhammad Mirza Pahlevi, Program Studi Ekonomi dan Bisnis, Universitas Nasional 2023.	Potensi Perkembangan Halal Food di Denpasar Bali.	Membahas pengembangan wisata syariah di Pulau Bali.	Penelitian ini menganalisis destinasi wisata umum yang ada di pulau Bali dilakukan dengan observasi langsung, sedangkan peneliti terdahulu menganalisis wisata di bidang makanan.
3	Heni Noviarita dkk, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Raden Intan Lampung 2021.	Analisis Halal Tourism dalam Meningkatkan Laju Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Lampung.	Membahas halal tourism.	Obyek penelitian ini terdapat di Pulau Bali, sedangkan peneliti terdahulu terdapat di Provinsi Lampung.
4	Susi Suryani dan Nawarti Bustamam, Universitas Islam Riau 2021.	Potensi Pengembangan Pariwisata Halal dan Dampaknya Terhadap Pembangunan Ekonomi Daerah Provinsi Riau.	Membahas potensi pengembangan pariwisata halal.	Obyek penelitian ini terdapat di Pulau Bali, sedangkan peneliti terdahulu terdapat di Provinsi Riau.
5	Ida Nurlatifah, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, UIN	Kebijakan Pengembangan Pariwisata Halal di Indonesia : Peluang, Tantangan, dan	Membahas pengembangan pariwisata halal.	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, sedangkan peneliti terdahulu menggunakan

No	Nama Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
	Syarif Hidayatullah 2020.	Strategi.		metode AHP (Analytic Hierarchy Process).
6	Prananda Firdaus, Prodi Manajemen, Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Universitas Islam Yogyakarta 2022.	Pengaruh Pariwisata Halal Terhadap Loyalitas Wisatawan Muslim Untuk Mengunjungi Bali.	Membahas pariwisata halal, obyek penelitian terdapat di Bali.	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, sedangkan peneliti terdahulu menggunakan metode kuantitatif.
7	Amalia Fiqia Wandhini dkk, IAIN Salatiga 2019.	Halal Tourism In Bali : Pengaruh dan Tantangan Mengembangkan Wisata Halal di Bali.	Membahas halal tourism di Bali.	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, sedangkan peneliti terdahulu menggunakan data primer dengan menggunakan kuisioner sebagai alat untuk meneliti Halal Tourism.
8	Naufal Achmad Maulana, Prodi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syariah, UIN Syarif Hidayatullah 2022.	Regulasi Pariwisata Halal di Provinsi Bali.	Membahas pariwisata halal di Bali.	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, sedangkan peneliti terdahulu menggunakan pendekatan fatwa DSN MUI, dan wawancara.
9	Inten Eqa Saputri, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Makassar 2020.	Analisis Potensi Pengembangan Wisata Halal Sebagai Lapangan Kerja Baru Untuk Peningkatan Ekonomi Masyarakat (Studi Objek Wisata Pantai Seruni Bantaeng)	Membahas potensi pengembangan wisata halal.	Obyek penelitian ini terdapat di Pulau Bali, sedangkan peneliti terdahulu di Seruni Bantaeng Sulawesi Selatan.

No	Nama Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
10	Salman Nasution, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara 2021.	Konsep Pariwisata Halal Berbasis Ekonomi Kreatif Dengan Sharia Regulation dalam Meningkatkan Pendapatan dan Kesejahteraan Masyarakat di Sumatera Utara.	Membahas pariwisata halal.	Penelitian ini membahas pariwisata halal dengan konsep Ekonomi Pembangunan Islam, sedangkan peneliti terdahulu membahas pariwisata halal dengan berbasis Ekonomi Kreatif.

Sumber : Data diolah, 2023

Dalam tabel penelitian terdahulu diatas yang membedakan dengan peneliti ialah, bahwasannya *stakeholder* di Bali mampu menerima pariwisata halal tanpa membatasi ataupun melarang aktivitas yang menyangkut pariwisata Halal.

B. Kajian Teori

1. Pengembangan Pariwisata

a. Definisi Pengembangan Pariwisata

Pengembangan pariwisata adalah suatu usaha untuk mengembangkan atau memajukan objek wisata agar objek wisata tersebut lebih baik dan lebih menarik ditinjau dari segi tempat maupun benda-benda yang ada didalamnya untuk dapat menarik minat wisatawan untuk mengunjunginya.

Pengembangan pariwisata juga salah satu cara agar lebih banyak wisatawan datang pada suatu kawasan wisata, lebih lama tinggal, dan lebih banyak mengeluarkan uangnya di tempat wisata yang mereka kunjungi sehingga dapat menambah devisa untuk

negara bagi wisatawan asing, dan menambah pendapatan asli daerah untuk wisatawan lokal.

Disamping itu juga, bertujuan untuk memperkenalkan dan memelihara kebudayaan di kawasan pariwisata. Sehingga, keuntungan dan manfaatnya juga bisa dirasakan oleh penduduk sekitar khususnya. Pengembangan pariwisata sebagai suatu industri secara ideal harus berlandaskan pada empat prinsip dasar yaitu sebagai berikut :

- 1) Kelangsungan ekologi, yaitu bahwa pengembangan pariwisata harus menjamin terciptanya pemeliharaan dan proteksi terhadap sumber daya alam yang menjadi daya tarik pariwisata, seperti lingkungan laut, hutan, pantai, danau, dan sungai.
- 2) Kelangsungan kehidupan sosial dan budaya, yaitu bahwa pengembangan pariwisata harus mampu meningkatkan peran masyarakat dalam pengawasan tata kehidupan melalui sistem nilai yang dianut masyarakat setempat sebagai identitas masyarakat tersebut.
- 3) Kelangsungan ekonomi, yaitu bahwa pengembangan pariwisata harus dapat menciptakan kesempatan kerja bagi semua pihak untuk terlibat dalam aktivitas ekonomi melalui suatu sistem ekonomi yang sehat dan kompetitif.

- 4) Memperbaiki dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat setempat melalui pemberian kesempatan kepada mereka untuk terlibat dalam pengembangan pariwisata.³²

Dengan demikian, pengembangan pariwisata (yang berkelanjutan) perlu didukung dengan perencanaan yang matang dan harus mencerminkan tiga dimensi kepentingan, yaitu industri pariwisata, daya dukung lingkungan (sumber daya alam), dan masyarakat setempat dengan sasaran untuk peningkatan kualitas hidup. Pengembangan pariwisata harus memperhatikan empat hal, diantaranya : analisa pasar, analisa teknik dan perencanaan, analisa socio-ekonomi, analisa bisnis dan hukum.

b. Indikator Pariwisata Halal

Dalam pariwisata halal, minimal terdapat dua faktor pendukung pariwisata halal, yaitu internal dan eksternal :³³

1) Faktor Internal

Faktor internal ialah keberagaman sumber daya alam dan jumlah sumber daya manusia yang banyak. Apabila diklasifikasikan, Islam merupakan agama dengan pemeluk terbesar dengan jumlah 207.176.162 jiwa atau 87% dari total populasi Indonesia. Data tersebut mengindikasikan bahwa

³² Nijla Syifyamal Ulya, dan Faruq Ahmad Futaqi, “Analisis Pengembangan Potensi Ekonomi Pariwisata Religi di Masjid Jami’ Tegalsari Ponorogo”, IAIN Ponorogo, *Journal of Economics and Business Research* 2 No. 1 (Januari-Juni 2022) : 178.

³³ Faizul Abrori, *Pariwisata Halal dan Peningkatan Kesejahteraan* (Malang: Literasi Nusantara, 2020), 11-13.

negeri ini sangat tepat untuk mengadopsi konsep pariwisata halal.

Secara geografis, Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan lebih dari 17.508 pulau. Wilayah pesisir itu pasti memiliki potensi wisata yang menjadi daya tarik karena kekayaan budaya sebagai potensi besar untuk mengembangkan industri pariwisata halal. Namun, perlu ditekankan kembali bahwa harus ada batasan-batasan budaya yang dapat diterima secara syariah dengan mengacu pada standar Halal dan tujuan bersyariah.

2) Faktor Eksternal

Faktor ini meliputi laporan GMTI 2018 tentang destinasi wisata ramah Muslim di dunia, penghargaan pariwisata halal dalam *World Halal Tourism Award 2016*, dan kunjungan wisatawan dapat di deskripsikan menjadi tiga bagian :

- a. faktor pertama berdasarkan laporan GMTI yang menunjukkan peringkat Indonesia mengalami peningkatan dari peringkat ke-3 menjadi peringkat ke-2 (2017-2018). Peningkatan peringkat Indonesia pada skala global menunjukkan bahwa banyak paket wisata yang telah menyediakan fasilitas ramah Muslim.
- b. faktor kedua berdasarkan beberapa industri pariwisata halal di Indonesia yang memperoleh penghargaan di ajang *World*

Halal Tourism Award 2016, Indonesia berhasil meraih 12 kemenangan dari 16 kategori, yaitu (1) world's best airline for halal travellers (Garuda Indonesia); (2) world's best airport for halal travellers (Sultan Iskandar Muda International Airport, Aceh); (3) world's best family friendly hotel (The Rhadana Kuta, Bali); (4) world's most luxurious family friendly hotel (The Trans Luxury Bandung); (5) world's best halal beach resort (Novotel Lombok Resort and Villa's); (6) world's best halal tour operator (ERO Tours Sumatera Barat); (7) world's best halal travel website (www.woderfullombok-sumbawa.com); (8) world's best halal honeymoon destination (Sumbawa Vallery Region, NTB); (9) world's best hajj and umroh operator (ESQ Tours and Travel); (10) world's best halal destination (Sumatera Barat); (11) world's best halal culinary (Sumatera Barat); dan (12) world's best halal cultural destination (Aceh);

c. faktor ketiga dapat dilihat dari keuntungan wisatawan.

Perkembangan jumlah wisatawan global yang berkunjung ke Indonesia selama 5 tahun terakhir dari (2014-2018) menunjukkan perkembangan yang signifikan terutama dari Malaysia untuk negara OIC dan China untuk negara non-OIC.

Menurut GMTI (*Global Muslim Travel Index*) ada tiga kelompok kriteria wisata halal. Pertama, destinasi ramah keluarga. Kedua, layanan dan fasilitas di destinasi yang ramah Muslim. Ketiga, kesadaran halal dan pemasaran destinasi. Berdasarkan GMTI yang menjadi acuan standar wisata Halal di dunia, dari tiga kriteria tersebut, terdapat 11 indikator turunan yang menjadi acuannya sebagai berikut :³⁴

1.) Destinasi Ramah Keluarga

- a. destinasi wisata harus ramah keluarga.
- b. keamanan umum bagi Wisatawan Muslim.
- c. jumlah kedatangan Muslim yang cukup ramai.

2.) Layanan dan Fasilitas di Destinasi yang Ramah Muslim

- a. pilihan makanan dan jaminan halalnya.
- b. akses ibadah yang mudah dan baik.
- c. fasilitas di bandara yang ramah Muslim.
- d. serta opsi akomodasi yang memadai.

3.) Kesadaran Halal dan Pemasaran Destinasi

- a. kemudahan komunikasi.
- b. jangkauan dan kesadaran kebutuhan wisatawan Muslim.
- c. konektivitas transportasi udara.
- d. serta persyaratan visa.

³⁴ Faizul Abrori, *Pariwisata Halal dan Peningkatan Kesejahteraan* (Malang: Literasi Nusantara, 2020), 14.

Untuk memenuhi 11 indikator tersebut, sebuah destinasi wisata Halal harus memiliki komitmen di tingkat pemangku kepentingan dan masyarakat. Dalam hal ini adalah pemerintah. Kemudian lokasi yang mudah diakses oleh seluruh anggota keluarga. Lalu segi keamanan umum tersedianya petugas keamanan seperti kepolisian, satpam dan jajarannya. Sementara untuk jumlah kedatangan wisatawan Muslim sendiri bisa melihat data dari Kemenpar, Parekraf, Imigrasi dan Bandara.

Pilihan makanan dan jaminan Halal yang menjadi komitmen restoran dan penyedia makanan lainnya. Akses ke tempat ibadah dan kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihannya. Selanjutnya fasilitas di bandara yang dilengkapi dengan tempat ibadah yang layak. Kemudian pilihan akomodasi seperti hotel yang sesuai dengan wisatawan Muslim tentunya. Misalnya, tersedianya perlengkapan ibadah serta penunjuk arah kiblat di kamar hotel. Kemudian kemudahan komunikasi dengan menyediakan jasa *translator*. Ditambah lagi dengan jangkauan dan kesadaran wisatawan Muslim oleh masyarakat setempat, konektivitas transportasi oleh maskapai dan persyaratan visa oleh bagian keimigrasian. Bagian tak terpisahkan lainnya dari wisata halal ini adalah pemandu

wisata yang juga harus menyesuaikan diri dengan wisatawan Muslim. Misalnya dengan menjaga adab berkomunikasi, menggunakan pakaian yang sopan sesuai standar Muslim serta tak lupa mengingatkan waktu beribadah tepat waktu kepada para wisatawan.³⁵

Menurut *John Fletcher* dan *David Gilbert* destinasi pariwisata paling tidak harus mencakup komponen-komponen utama sebagai berikut :³⁶

1. Objek dan Daya Tarik (*attraction*), atraksi memberikan satu-satunya alasan terpenting untuk wisata rekreasi ke suatu tujuan. Setiap daerah dan setiap kota memiliki setidaknya satu daya tarik, menambah daya tariknya sebagai tujuan. Atraksi unggulan tidak perlu ikonik atau karakteristik destinasi, kemampuan mereka untuk menarik pengunjung adalah manfaat utama mereka.

Contoh daya tarik yang biasa digunakan berbasis utama pada kekayaan alam, budaya maupun buatan.

2. Akomodasi (*amenity*), dalam konteks sektor pariwisata pada umumnya, akomodasi merupakan komponen yang diperlukan dalam pengembangan pariwisata di setiap destinasi yang berupa melayani pengunjung selain

³⁵ Faizul Abrori, *Pariwisata Halal dan Peningkatan Kesejahteraan* (Malang: Literasi Nusantara, 2020), 14.

³⁶ John Fletcher and David Gilbert, *Tourism Principle and Practice* (British: Library of Congress Cataloging, 2018), 309.

pelancong harian. Jarang seorang turis memilih tinggal di hotel atau bentuk akomodasi lain untuk kepentingan sendiri. Melainkan pilihan tersebut dibuat karena pihak akomodasi memberikan layanan pendukung motivasi yang lebih luas yang telah membawa pengunjung ke tempat tujuan, baik untuk bisnis atau tujuan rekreasi.³⁷

3. Transportasi (*accessibility*), kontribusi transportasi yang paling penting adalah sebagai sarana transit antara daerah asal wisata utama dan daerah tujuan. Ini menyumbang sekitar 90% dari penggunaan transportasi turis. Ini adalah permintaan turunan, yang tidak dilakukan untuk kepentingannya sendiri tetapi hanya sebagai sarana untuk berpindah dari daerah penghasil pariwisata ke tujuan wisata.³⁸

4. Fasilitas pendukung (*ancillary services*), ketersediaan fasilitas pendukung yang digunakan oleh wisatawan, seperti bank, telekomunikasi, rumah sakit, dan lain sebagainya.³⁹

5. Kelembagaan (*institutions*), karena industri pariwisata tidak mengendalikan semua faktor yang membentuk daya

³⁷ John Fletcher and David Gilbert, *Tourism Principle and Practice* (British: Library of Congress Cataloging, 2018), 346.

³⁸ John Fletcher and David Gilbert, *Tourism Principle and Practice* (British: Library of Congress Cataloging, 2018), 409.

³⁹ John Fletcher and David Gilbert, *Tourism Principle and Practice* (British: Library of Congress Cataloging, 2018), 383.

tarik suatu destinasi dan dampaknya terhadap penduduk tuan rumah cukup besar, pilihan mengenai pengembangan pariwisata perlu dipertimbangkan pada tingkat tertinggi. Pemerintah dan kerangka kerja administrasi publik yang sesuai diberlakukan. Sebagai aturan, semakin besar pentingnya pariwisata bagi perekonomian suatu negara, semakin besar keterlibatan sektor publik, hingga memiliki kementerian pemerintah yang bertanggung jawab penuh atas pariwisata.⁴⁰

C. Ruang Lingkup Pariwisata Halal

1. Objek, Tujuan dan Target

Komparasi objek, tujuan dan target antara pariwisata konvensional, wisata religi dan wisata Halal menunjukkan perbandingan dari jenis wisata tersebut. objek wisata merujuk pada sesuatu yang terdapat dalam kawasan wisata yang menjadi faktor penarik wisatawan untuk berkunjung. Secara umum objek wisata Halal lebih kompleks dibandingkan dengan wisata konvensional hanya berfokus pada alam, budaya, sejarah, kuliner. Sedangkan pada wisata religi objek utamanya adalah tempat ibadah dan peninggalan sejarah. Wisata syariah mampu merangkum semua daya tarik tersebut menjadi objek yang menarik wisatawan. Sehingga pariwisata Halal lebih fleksibel dari segi objek daya tarik wisata.

⁴⁰ John Fletcher and David Gilbert, *Tourism Principle and Practice* (British: Library of Congress Cataloging, 2018), 448.

Wisata halal memiliki tujuan meningkatkan spiritualitas dengan cara menghibur. Wisatawan yang mengunjungi masjid bisa menikmati keindahan dan kemegahan bangunan sekaligus sebagai media mendekatkan diri kepada Allah Swt. Sebaliknya pada wisata konvensional, wisatawan hanya menikmati objek hanya untuk hiburan, misalnya berkunjung ke wahana permainan. Wisata religi hanya berfokus pada wisata yang bertujuan untuk meningkatkan spiritualitas tanpa mempertimbangkan esensi hiburan, contohnya ziarah kubur.

Aspek target wisata ketiganya memiliki perbedaan yang mendasar, wisata konvensional target utamanya hanya untuk memenuhi kepuasan, kesenangan berorientasi pada nafsu, atau keinginan hiburan semata. Sebaliknya pada wisata religi hakikatnya hanya pada wisata yang bertujuan untuk menenangkan jiwa dan batin. Kondisi berbeda pada wisata syariah memiliki target memenuhi dari keinginan dan kesenangan serta menumbuhkan kesadaran dalam beragama. Sehingga dapat dikatakan berwisata konvensional sekaligus berwisata religi.⁴¹

2. Wawasan Pemandu Wisata

Pemandu wisata (*tour guide*) mempunyai peran penting karena kemampuannya mempengaruhi wisatawan untuk mengunjungi suatu objek wisata agar tertarik untuk berkunjung

⁴¹ Fadhil Surur, *Wisata Halal : Konsep dan Aplikasi* (Samata, Kabupaten Gowa: UPT Perpustakaan UIN Alauddin, 2020), 44-45.

kembali. Keunggulan atau keistimewaan dalam berkomunikasi dengan baik dan memberi informasi akurat membuat wisatawan merasa nyaman berwisata. Oleh karena itu diperlukan keahlian berbahasa verbal yang baik.

Kepuasan wisatawan adalah perbandingan antara jasa yang diberikan dan keinginan atau kebutuhan wisatawan. Jika tidak sesuai dengan keinginan maka wisatawan cenderung merasa tidak puas dan senang. Keterampilan pemandu wisata memegang kunci kepuasan wisatawan agar merasa nyaman dan aman.

Pemandu wisata dituntut agar memiliki keahlian berbahasa verbal yang baik dalam menjalankan tugasnya yaitu :

- a. mengatur kegiatan perjalanan berdasarkan program atau jadwal perjalanan (*itinerary*) yang telah disepakati.
- b. memandu wisatawan ke objek daya tarik yang diinginkan, dan
- c. memberikan penjelasan atau informasi tentang objek daya tarik wisata yang dikunjungi berupa informasi sejarah, budaya, adat-istiadat, dan informasi lainnya yang menarik bagi wisatawan.⁴²

3. Fasilitas Ibadah

Fasilitas objek wisata dalam dua jenis yaitu :

- a. fasilitas primer sebagai objek wisata dengan fungsi sebagai daya tarik utama wisata, dan

⁴² Fadhil Surur, *Wisata Halal : Konsep dan Aplikasi* (Samata, Kabupaten Gowa: UPT Perpustakaan UIN Alauddin, 2020), 46-48.

b. fasilitas penunjang sebagai bangunan selain fasilitas primer yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan wisatawan selama berwisata. Fasilitas penunjang kemudian dibagi menjadi dua bagian yaitu :

- 1) Fasilitas sekunder yaitu bangunan yang bukan merupakan daya tarik utama wisata tetapi digunakan untuk memenuhi kebutuhan utama wisatawan seperti penginapan, rumah makan, dan toko cinderamata.
- 2) Fasilitas kondisional yaitu bangunan yang digunakan oleh wisatawan maupun warga setempat seperti masjid, toilet umum dan tempat parkir.

Pembagian fasilitas tersebut hanya berlaku pada wisata konvensional dan wisata religi. Masjid sebagai sarana ibadah berfungsi sebagai fasilitas penunjang dan sifatnya tentative, artinya hanya dibutuhkan sesuai dengan kondisi atau keinginan pengunjung saja. Masjid tidak termasuk paket hiburan dan bukan bagian inti dari objek wisata yang dikembangkan, sedangkan pada wisata Halal, masjid yang sesuai dengan standar menjadi bagian yang menyatu dengan objek wisata itu sendiri. Ritual ibadah adalah bagian paket hiburan yang ditawarkan. Pengelola memposisikan masjid sebagai fasilitas primer dengan tata letak harus berada pada zona inti kawasan wisata. Pandangan wisatawan akan tertuju pada masjid sebagai objek wisata utama. Pengertian tersebut menunjukkan

dwifungsi, fungsi dari masjid yaitu sebagai fasilitas ibadah sekaligus bagian daya tarik wisata.⁴³

4. Kuliner

Usaha rumah makan merupakan hal yang sangat penting dalam industri pariwisata. Berperan mempermudah wisatawan yang berkunjung dalam memenuhi kebutuhan makan dan minum. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 28 Tahun 2015 tentang Standar Usaha Pusat Penjualan Makanan mengarahkan dalam tiga aspek penting dalam meningkatkan mutu penyelenggaraan usaha makanan yaitu aspek produk, pelayanan, pengelolaan usaha pusat penjualan makanan.

Terdapat banyak hal yang harus dilewati standarisasi agar bisnis kuliner bisa berkembang cepat dan memberikan hasil yang baik bagi pebisnis. Beberapa standar yang harus diperhatikan, antara lain kualitas pelayanan, kebersihan, penampilan petugas, cara berkomunikasi kepada konsumen, kualitas dan rasa, dan aspek-aspek pendukung lain seperti suasana, musik dan lainnya. Wisatawan yang berkunjung ke suatu objek wisata tentunya ingin menikmati perjalanan wisatanya, sehingga pelayanan makanan dan minuman harus mendukung hal tersebut bagi wisatawan yang tidak membawa bekal. Kondisi ini memungkinkan tersedianya makanan dan minuman Halal bagi wisatawan.

⁴³ Fadhil Surur, *Wisata Halal : Konsep dan Aplikasi* (Samata, Kabupaten Gowa: UPT Perpustakaan UIN Alauddin, 2020), 49-50.

Wisata konvensional akan menyajikan daya tarik wisata kuliner berupa makanan umum, sedangkan pada pariwisata halal akan berlaku prinsip-prinsip syariah dalam pemilihan bahan, pengolahan makanan dan penyajiannya. Usaha jasa makanan di destinasi wisata halal beroperasi sesuai dengan peraturan produk halal. Indonesia berpedoman pada standarisasi kehalalan makanan dan minuman dengan ketentuan sebagai berikut :⁴⁴

- a. tidak boleh mengonsumsi dan menggunakan nama dan atau simbol-simbol makanan atau minuman yang mengarah kepada kekufuran dan kecurangan.
- b. tidak boleh mengonsumsi dan menggunakan nama dan atau simbol-simbol makanan atau minuman yang mengarah kepada nama-nama binatang atau benda yang diharamkan terutama babi dan khamar, kecuali yang telah mentradisi (*urf*) dan dipastikan tidak mengandung unsur-unsur yang diharamkan seperti nama bakso, bakmi, bakwan, bakpia dan bakpao.
- c. tidak boleh mengonsumsi dan menggunakan bahan campuran bagi komponen makanan dan minuman yang menimbulkan rasa atau aroma benda-benda atau binatang yang diharamkan, seperti mie instan rasa babi.

⁴⁴ Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 tentang Standarisasi

d. tidak boleh mengonsumsi makanan atau minuman yang menggunakan nama-nama makanan atau minuman yang diharamkan.

Kuliner pada wisata Halal bersifat spesifik dibandingkan dengan wisata yang lain (konvensional dan religi). Hal ini menyangkut dengan kehalalan makanan dari hulu sampai hilir. Islam sangat memperhatikan unsur makanan dan minuman, segala sesuatunya diatur sesuai syariat. Perintah dari Allah Swt untuk selalu menjaga kehalalan makanan dan beramal kebaikan yang akan menjaga keseimbangan fitrah manusia.⁴⁵

5. Relasi dengan Masyarakat

Kegiatan pariwisata berlangsung dengan menghubungkan antara *supply* (aspek destinasi wisata) dan *demand* (aspek pengunjung) yang berkaitan satu sama lain. Hubungan antara wisatawan dengan masyarakat sebagai pelaku wisata pada wisata konvensional dan wisata religi bersifat saling melengkapi. Pelaku wisata menyediakan objek wisata beserta daya tariknya sedangkan wisatawan membutuhkan segala sesuatu yang tersedia di objek wisata tersebut. hubungan tersebut akan bekerja yang dipengaruhi mekanisme pasar, wisatawan akan membayar sejumlah uang untuk dapat menikmati objek-objek yang ada. Berbeda dengan wisata halal relasi antara *supply* dan *demand* diwujudkan dengan sistem syariah.

⁴⁵ Fadhil Surur, *Wisata Halal : Konsep dan Aplikasi* (Samata, Kabupaten Gowa: UPT Perpustakaan UIN Alauddin, 2020), 50-53.

Selain itu, juga terbentuk relasi yang terintegrasi berarti tidak ada kekhususan untuk wisatawan. Mereka akan mendapatkan pelayanan yang sama ketika berwisata. Pengelola destinasi wisata yang dilakukan oleh masyarakat harus sesuai dengan prinsip syariah antara lain kepemilikan, pertumbuhan yang seimbang, keadilan dan bekerja sama dengan kebaikan. Pelaku wisata tidak boleh bertindak semena-mena terhadap pengunjung contohnya menaikkan tarif masuk ke objek wisata yang tidak sesuai dengan standar pemetintah.⁴⁶

6. Agenda Perjalanan

Perbedaan mendasar yang terakhir antara pariwisata konvensional, wisata religi dan wisata Halal adalah pada aspek agenda perjalanan. Konteks wisata konvensional, agenda wisata dapat dilakukan setiap waktu, tidak ada ketentuan waktu kapan sebaiknya wisata dapat dilakukan. Terdapat waktu tertentu yang sifatnya akan menarik pengunjung lebih banyak, misalnya pada penghujung tahun atau musim libur sekolah. Selain itu dalam satu pekan tidak ada hari tertentu yang membatasi pengunjung untuk berwisata.

Agenda perjalanan pada wisata religi hanya dilakukan pada waktu-waktu tertentu. Pengelola wisata religi hanya dapat menerima pengunjung pada waktu yang telah ditentukan. Seluruh objek wisata

⁴⁶ Fadhil Surur, *Wisata Halal : Konsep dan Aplikasi* (Samata, Kabupaten Gowa: UPT Perpustakaan UIN Alauddin, 2020), 53-54.

di Bali akan dibatasi jika masyarakat setempat memperingati hari besar umat Hindu antara lain Galungan atau Nyepi. Wisata religi di Jawa Tengah hanya berlangsung jika bertepatan dengan acara Maulid Nabi. Berbeda halnya dengan agenda perjalanan wisata Halal yang berlangsung dengan memperhatikan waktu, artinya agenda atau daftar yang disusun tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Misalnya salat Jum'at atau agenda perjalanan untuk pendakian ekowisata dibuka pada bulan Ramadhan. Durasi berwisata harus disesuaikan dengan kebutuhan sehingga perjalanan wisata tidak berlangsung sia-sia atau hanya sekedar membuang-buang waktu, sehingga hakikat wisata Halal tidak tercapai.⁴⁷

2. Ekonomi Pembangunan Islam

a. Pengertian Ekonomi Pembangunan Islam

Ekonomi pembangunan dalam pandangan ekonomi kapitalis selalu dilihat dari aspek pembangunan fisik dan non-fisik. Ekonomi kapitalis telah mengabaikan pembangunan nilai-nilai moral dan spiritual serta pembangunan didalam diri manusia itu sendiri. Dan sebaliknya, konsep pembangunan ekonomi dalam pandangan Islam meliputi pembangunan dalam akhlak, kerohanian dan materi. Aspek akhlak, spiritual, materi, sosial dan ekonomi tidak dapat dipisahkan untuk mencapai sebuah pembangunan dalam aspek sosial, ekonomi dan politik

⁴⁷ Fadhil Surur, *Wisata Halal : Konsep dan Aplikasi* (Samata, Kabupaten Gowa : UPT Perpustakaan UIN Alauddin, 2020), 54-55.

dalam Islam. Pembangunan dalam sudut pandang Islam menjadikan nilai dan norma-norma dalam aspek yang paling utama dan ditujukan kearah kesejahteraan hidup manusia dalam semua aspek yang ada.

Kesejahteraan dan *falah* dalam kehidupan manusia dilewati dengan kehidupan sementara manusia di dunia secara sejahtera, dan *falah* manusia dalam kehidupan kekal abadi di akhirat. Fokus dan inti utama dari pembangunan dalam Islam ialah pembangunan manusia itu sendiri termasuk secara keseluruhan yang ada. Hal ini telah menunjukkan bahwasannya Islam menganggap diri manusia sendirilah yang merupakan sebuah tempat dari aktivitas pembangunan.

Pembangunan ekonomi dalam Islam bersifat multidimensional (berbagai sudut dimensi) yaitu pembangunan yang seimbang antara faktor materi dan spiritual, kuantitatif dan kualitatif, luar dan dalam, rohani dan jasmani. Dinamika dalam kehidupan sosial Islam ialah memberikan penekanan yang istimewa kepada dua hal : pertama, mengoptimalkan secara optimal terkait apa yang Allah karuniakan kepada manusia dan juga alam serta lingkungan yang telah Allah ciptakan. Kedua, mengoptimalkan alokasi sumber-sumber daya yang diberikan secara adil dengan berlandaskan hak dan keadilan sesama manusia. Sumber daya manusia merupakan satu-satunya sumber

daya yang mempunyai akal, perasaan, keinginan, kemampuan, keterampilan, dan ilmu pengetahuan. Hal inilah yang mewajibkan agar manusia dapat memanfaatkan sumber daya yang ada dengan baik. Dengan hal ini Islam melihat bahwa ada empat faktor yang juga sangat penting dalam pembangunan ekonomi, diantaranya adalah :

1) Sumber Daya yang dapat dikelola (*Investable Resources*).

Untuk menghasilkan pendapatan dan peningkatan dalam aspek ekonomi diperlukan sumber daya manusia yang mampu mengelola ⁴⁸sumber daya alam yang ada. Aspek yang dimaksud antara lain adalah dalam bidang perindustrian, bidang mesin, dan sebagainya. Proses pertumbuhan ekonomi dimobilisasi oleh sumber daya yang ada, merubah sumber daya dalam bentuk aset produktif, serta dapat digunakan secara optimal agar termanfaatkan dengan baik.

2) Sumber Daya Manusia (*Human Resources*). Faktor penentu

lainnya yang sangat penting ialah sumber daya manusia. Manusia adalah yang paling aktif dalam berperan mengembangkan ekonomi. Peran mereka meliputi dari beberapa macam bidang, antara lain dalam hal optimalisasi sumber daya yang ada, pengakumulasian modal, serta pembangunan institusi sosial ekonomi dan politik masyarakat.

⁴⁸ Soritua Ahmad Ramdani Harahap dan Syamsuri, "Pandangan Khursyid Ahmad Terhadap Efektivitas Sumber Daya Manusia dalam Pembangunan Ekonomi Islam", Universitas Darussalam Gontor, *Jurnal Ekonomi Syariah* 06 No. 02 (Oktober 2019) : 335-337.

Untuk mencapai peningkatan ekonomi yang diharapkan, maka perlu adanya efisiensi dalam melakukan pekerjaan. Efisiensi dalam penggunaan sumber daya yang ada membutuhkan kualitas profesional dan kualitas moral dari sumber daya manusia itu sendiri. Hubungan keduanya harus dipenuhi dan tidak dapat berdiri sendiri. Hubungan keduanya harus disatukan dalam ketentuan-ketentuan yang ditetapkan.

3) Wirausaha (*Enterpreneurship*). Wirausaha merupakan poin penting dalam sebuah proses pembangunan ekonomi yang ideal. Wirausaha dianggap memiliki fungsi dinamis untuk menopang pembangunan ekonomi. Wirausaha dapat menarik dan menghimpun tenaga kerja yang banyak. Semakin banyaknya wirausaha akan mampu mendorong pembangunan perekonomian.

4) Teknologi (*Technology*). Para ekonom menjelaskan bahwa kemajuan sebuah teknologi merupakan sumber terpenting lainnya bagi pembangunan ekonomi. Dinamika berkelanjutan ini berkaitan dengan inovasi teknologi. Kemajuan teknologi mencakup dua bentuk, yaitu produk dan inovasi proses. Inovasi produk berkaitan dengan produk baru yang sebelumnya tidak ada atau adanya pengembangan produk sebelumnya. Sedangkan dalam inovasi proses diperlukan keahlian dalam

menggunakan teknik-teknik baru yang lebih murah dalam memproduksi

Salah satu cara yang paling cepat dalam mempercepat sebuah pembangunan ekonomi yang berkeadilan dengan membuat kelompok masyarakat agar mampu semaksimal mungkin menggunakan sumber daya yang ada dengan sebuah kreasi, inovasi secara profesional, produktif dan efisien. Hal inilah yang harus dimiliki seorang Muslim, semangat *entrepreneurship* harus semakin tumbuh dan terbangun dalam jiwa masyarakat Muslim.

Adapun tujuan sistem ekonomi, sangat ditentukan oleh pandangan terhadap dunia. Pandangan ini akan sangat menentukan tujuan dan strategi yang akan dilakukan dalam perekonomian. Islam sebagai pandangan hidup, mempunyai pandangan yang berbeda dari sistem ekonomi lainnya.

Pandangan hidup Islam didasarkan pada tiga konsep fundamental, yaitu *tauhid* (ke-esaan Allah), *khalifah*, dan *adl* (keadilan).

- 1) Konsep *tauhid* adalah konsep utama dari ketiganya, karena dua diantaranya merupakan turunan logika dari Nya. *Tauhid* adalah pengakuan terhadap ke-esaan Allah. *Tauhid* mengandung implikasi bahwa alam semesta tidak ada dengan sendirinya, namun dibentuk dan diciptakan oleh Allah Swt.

Penciptaan segala sesuatu mempunyai tujuan tertentu. Tujuan inilah yang kemudian memberikan eksistensi bagi alam semesta di mana manusia termasuk didalamnya. Jika demikian, manusia yang diberi akal, kesadaran moral dan kesadaran ketuhanan yang inheren dituntut untuk hidup dalam kepatuhan dan ibadah kepada Allah Swt. Dengan demikian, konsep *tauhid* bukan sekedar pengakuan realitas, tetapi respon aktif terhadap-Nya.

2) Konsep *khalifah* adalah konsep yang menyatakan bahwa manusia adalah *khalifah* (wakil) di muka bumi. Ia mempunyai tanggung jawab kepada Allah dalam segala perbuatannya di muka bumi. Apa yang ada di tangan manusia termasuk sumber-sumber daya merupakan amanah yang harus dijaga dan digunakan sesuai dengan tuntunan agama. Konsep *khalifah* mencakup semua manusia, bukan perorangan, kelompok atau negara tertentu, ini mengandung arti persatuan fundamental dan persaudaraan manusia.

3) Konsep *adl* (keadilan) meliputi pemenuhan kebutuhan pokok manusia. Kebutuhan-kebutuhan pokok ini adalah agama (*dien*), jiwa (*nafs*), akal (*aql*), keturunan (*nasl*) dan harta (*mal*). Lima unsur ini senantiasa harus dijaga dan dipelihara. Selain pemenuhan kebutuhan pokok, keadilan dapat ditegakkan lewat pendistribusian kekayaan yang merata. Ini

dimaksudkan agar tidak terjadi kesenjangan ekonomi yang tajam yang berdampak pada distorsi pemenuhan kebutuhan orang lain.

Ketiga konsep diatas saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Kepercayaan pada ke-esaan Tuhan dan pembangunan moral terimplementasi dalam semua nilai dalam rangka penegakan yang diwajibkan oleh Allah Swt lewat *Al-Qur'an* dan *Al-Hadist*. Ia berfungsi sebagai batu loncatan segenap aksi kebijakan termasuk penegakan keadilan.⁴⁹

b. Indikator Pembangunan dalam Perspektif Ekonomi Islam

Apabila di era modern, fokus pembangunan masih pada pertimbangan aspek ekonomi semata (material), hal ini yang melahirkan indikator pembangunan pada pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita.⁵⁰

Ekonomi Islam sebagai suatu sistem ekonomi yang memiliki aturan dan prinsip yang telah ditetapkan oleh syariat Islam, tentu akan memiliki turunan nilai yang sedikit berbeda dengan ekonomi konvensional. Salah satu yang membedakan ialah setiap proses pembangunan harus mampu mencapai lima tujuan dalam *maqashid syariah*, yaitu :

⁴⁹ Ahmad Suminto dan Soritua Ahmad Ramdani Harahap, "Ekonomi dalam Pandangan Islam : Serta Perannya dalam Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Ekonomi Pembangunan Islam", Universitas Darussalam Gontor, *Journal of Sharia and Economic Law* 1 No. 1 (Juni 2021) : 9-10.

⁵⁰ A. Jajang W. Mahri, *Ekonomi Pembangunan Islam* (Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah-Bank Indonesia, 2021), 151.

- 1.) *Hifdzu din* (melindungi agama);
- 2.) *Hifdzu nafs* (melindungi jiwa);
- 3.) *Hifdzu aql* (melindungi pikiran);
- 4.) *Hifdzu mal* (melindungi harta);
- 5.) *Hifdzu nasab* (melindungi keturunan);

Kelima *maqashid* tersebut bertingkat-tingkat sesuai dengan tingkat *masalah* dan kepentingannya, tingkatan urgensi dan kepentingan tersebut ada tiga, yaitu :

- 1.) *Dharuriyat*, kebutuhan yang harus dipenuhi. Yang jika tidak dipenuhi maka akan membuat kehidupan menjadi rusak.
- 2.) *Hajjiyat*, kebutuhan yang sebaiknya dipenuhi. Yang jika tidak dipenuhi akan mengakibatkan kesulitan.
- 3.) *Tahsiniyat*, kebutuhan pelengkap. Yang jika tidak dipenuhi akan membuat kehidupan kurang nyaman.⁵¹

Ekonomi Islam adalah cabang ilmu yang membantu menyejahterahkan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang sesuai dengan ajaran Islam, tanpa membatasi kebebasan individu atau menciptakan ketidakseimbangan ekonomi makro. Pembangunan ekonomi dimaksudkan untuk menjaga dan melestarikan lima unsur pokok penunjang kehidupan manusia yaitu, agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Fokus pembangunan ekonomi tidak hanya terletak pada

⁵¹ A. Jajang W. Mahri, *Ekonomi Pembangunan Islam* (Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah-Bank Indonesia, 2021), 152.

pembangunan material semata, tetapi juga menempatkan manusia sebagai pelaku dan objek utama dari pembangunan itu sendiri seiring fungsinya sebagai *khalifah* di bumi.

Pada dasarnya setiap manusia adalah pemimpin. Dalam Islam, manusia tidak hanya sebagai seorang pemimpin, melainkan juga sebagai makhluk Allah Swt. Yang paling mulia dengan fungsi *khalifah* yang harus dipertanggungjawabkan. Dalam konteks inilah, manusia perlu senantiasa meningkatkan ilmu pengetahuan untuk memenuhi fungsi tersebut.⁵²

c. Orientasi Pembangunan dalam Islam

Arah pembangunan dalam Islam terbagi menjadi 3 tujuan, yaitu: 1) *People Oriented*, 2) *Maslahah Oriented*, dan 3) *Falah Oriented*. Masing-masing arah tersebut dijelaskan sebagai berikut :

1) *People-Oriented (people-centred)*

Orientasi pertama dari ekonomi pembangunan Islam adalah pembangunan yang berbasis pada kepentingan manusia (*people centred*). Dari model pembangunan Islam yang dibahas pada bagian sebelumnya, menunjukkan bahwa pusat dari pembangunan adalah manusia. Dalam proses pembangunan, pembangunan dilakukan oleh manusia dan ditujukan untuk kebaikan manusia itu sendiri. Dalam bahasa

⁵² A. Jajang W. Mahri, *Ekonomi Pembangunan Islam* (Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah-Bank Indonesia, 2021), 185.

lain, manusia berperilaku sebagai subjek dan objek sekaligus. Pembangunan aspek material seperti infrastruktur diposisikan bukan sebagai orientasi utama tetapi tetap menjadi suatu hal yang penting dalam pembangunan. Pembangunan infrastruktur ditujukan untuk kebaikan manusia itu sendiri sehingga pembangunan infrastruktur yang banyak dijadikan sebagai orientasi pembangunan konvensional hanya diposisikan sebagai perantara orientasi utama dalam rangka untuk membangun manusia. Pembangunan infrastruktur yang baik dapat diartikan sebagai pembangunan infrastruktur yang berorientasi untuk kebaikan manusia.⁵³

2) *Maslahah-Oriented*

Orientasi ekonomi pembangunan Islam yang kedua adalah *maslahah*. Ini merupakan kelanjutan dari orientasi pertama ekonomi pembangunan Islam. Setelah memastikan bahwa pembangunan di dalam Islam harus berorientasi pada pembangunan manusia, maka hal kedua yang harus dipastikan adalah manfaat pembangunan itu tidak hanya untuk segelintir orang, tetapi harus untuk kesejahteraan umum (*maslahat*) serta tidak menimbulkan *mudharat* bagi sebagian yang lain. *Maslahah* di satu sisi dapat diartikan sebagai kebaikan dan menghindari keburukan (*keburukan*).

⁵³ A. Jajang W. Mahri, *Ekonomi Pembangunan Islam* (Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah-Bank Indonesia, 2021), 128-129.

Namun selain itu secara spesifik juga dapat diartikan sebagai kebaikan/kepentingan umum (*maslahatul ummah*). Berkaca dari pengertian tersebut maka dapat disintesis bahwa pembangunan yang berorientasi *maslahat* adalah pembangunan yang berlandaskan pada kebaikan dan kepentingan bersama. Lebih lanjut, pembangunan yang dimaksudkan dalam Islam adalah pembangunan yang tidak hanya mengayomi segelintir orang, tetapi haruslah memenuhi kepentingan masyarakat secara umum. Hal ini sejalan dengan salah satu determinan dalam model Ibnu Khaldun, yaitu keadilan. Ditambah lagi jika berbicara tentang konsep *maslahah* dalam ekonomi Islam, maka tidak dapat dipisahkan dengan konsep berkah, di mana *kemaslahatan* itu juga harus bersifat *ziyadatul khair* yaitu memberikan kebaikan yang berlapis-lapis atau berkelanjutan. Sehingga orientasi dari ekonomi pembangunan Islam adalah kebaikan bersama yang juga melahirkan kebaikan-kebaikan setelahnya.

Orientasi ini jugalah yang mengarahkan ekonomi pembangunan Islam untuk mencegah terjadinya ketimpangan dan kemiskinan. Walaupun secara *aggregate* terjadi peningkatan kualitas hidup (pendapatan/PDB), tetapi di sisi lain juga meningkatkan ketimpangan antar manusia bukanlah proses pembangunan yang sesuai dengan orientasi pembangunan Islam. Dalam model pembangunan Islam,

keadilan memiliki peranan penting. Keadilan akan mencegah terjadinya konflik dan perbedaan kepentingan antara masyarakat dan pemerintah. Orientasi ini juga mendorong sistem ekonomi pembangunan Islam memprioritaskan pengentasan kemiskinan terlebih dahulu sebelum melakukan pembangunan di aspek lainnya.

3) *Falah-Oriented*

Orientasi selanjutnya dari ekonomi pembangunan Islam adalah *falah*. Secara bahasa *falah* dapat diartikan kemenangan. Kemenangan dalam konteks ini adalah kemenangan hakiki, yaitu kemenangan dunia dan juga kemenangan akhirat. Berdasarkan prinsip ini maka orientasi pembangunan dalam Islam tidak hanya mempertimbangkan aspek dunia tetapi juga sangat mempertimbangkan aspek akhirat atau keridaan Allah Swt. Orientasi pembangunan tidak boleh sekadar kebermanfaatan untuk manusia melainkan harus sesuai dengan kaidah syariat.

Orientasi *falah* mendorong proses pembangunan yang mendukung prinsip *sustainable development* dan *environmental-friendly development*. Pada dasarnya dalam Islam, kaidah pembangunan bukan hanya mengenai keberlanjutan pembangunan dalam konteks *duniawi*, tetapi juga konteks *ukhrawi*. Etika yang dibentuk dalam proses pembangunan bukan etika kebaikan universal semata melainkan juga etika dalam nilai-nilai agama.⁵⁴

⁵⁴ A. Jajang W. Mahri, *Ekonomi Pembangunan Islam* (Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah-Bank Indonesia, 2021), 130-131.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian kualitatif berkenaan dengan data yang bukan angka, mengumpulkan dan menganalisis data yang bersifat naratif. Metode penelitian kualitatif terutama digunakan untuk memperoleh data yang kaya, informasi yang mendalam tentang isu atau masalah yang akan dipecahkan. Metode kualitatif menggunakan fokus grup, interview secara mendalam, dan observasi berperan serta, dalam mengumpulkan data.⁵⁵ Sehingga peneliti mendapatkan informasi langsung dan terbaru tentang masalah yang peneliti kemukakan yaitu tentang Analisis Potensi Pengembangan Pariwisata Halal di Pulau Bali dalam Konsep Ekonomi Pembangunan Islam.

B. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi yang dijadikan tempat penelitian adalah Dinas Pariwisata Provinsi Bali yang berlokasi Jl. Letjen S. Parman, Renon, Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali 80235. Adapun alasan peneliti memilih lokasi penelitian di Dinas Pariwisata Provinsi Bali karena semua pelaku pariwisata berada di bawah naungan Dinas Pariwisata. Jadi peneliti tertarik dan ingin meneliti Dinas Pariwisata Provinsi Bali.

C. Subjek Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan purposive sampling yaitu teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu.

⁵⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2022), 3.

Pertimbangan tertentu ini misalnya orang tersebut dianggap paling mengetahui tentang apa yang kita harapkan, sehingga memudahkan peneliti dalam memperoleh informasi adalah : a. adyatama kepariwisataan dan ekonomi kreatif ahli muda/sub koordinator unit substansi standar dan sertifikasi usaha. b. sub koordinator unit substansi promosi. c. staff bagian pelayanan umum dan d. wisatawan;

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.⁵⁶ Adapun beberapa teknik dalam pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi.

1. Observasi

Observasi atau yang disebut pula dengan pengamatan merupakan kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan seluruh panca indra. Oleh karena itu, observasi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja panca indra mata serta dengan panca indra lainnya.

Dengan metode observasi, peneliti dapat langsung mencatat setiap kejadian yang berlangsung dilapangan, dan peneliti dapat langsung memperoleh data dari informan yang dibutuhkan.

⁵⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), 224.

Data yang nantinya kan diperoleh oleh peneliti yaitu pendapat para informan mengenai konsep pariwisata halal di Pulau Bali dalam pelaksanaannya. Serta konsep pariwisata halal untuk masa sekarang dan masa yang akan datang.

2. Wawancara

Metode wawancara juga bisa disebut dengan metode *interview*. Metode wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara atau orang yang diwawancarai.⁵⁷ Pewawancara adalah orang yang menggunakan metode wawancara sekaligus dia bertindak sebagai pimpinan dalam proses wawancara tersebut. dia juga berhak menentukan materi yang akan diwawancarai serta kapan dimulai dan diakhiri. Akan tetapi, responden bisa menentukan perannya dalam hal kesepakatan mengenai kapan waktu wawancara akan dilaksanakan.

Wawancara digunakan untuk teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan informan yakni adyatama kepariwisataan, sun koordinator unit substansi promosi, staff pegawai Dinas Pariwisata, dan wisatawan untuk menggali

⁵⁷ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 142.

keterangan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti yakni analisis potensi pengembangan pariwisata halal di Pulau Bali.

Teknik wawancara yang dilakukan yaitu wawancara baku terbuka jenis wawancara ini adalah yang menggunakan seperangkat pertanyaan baku, dan urutan pertanyaan, kata-kata dan cara penyajian sama pada setiap responden. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya kekeliruan. Jenis ini sengaja dipilih karena dengan wawancara dalam penelitian ini dilakukan dilembaga formal, tapi terbuka karena dirasa akan lebih terbuka dalam mewawancarai informan sehingga tidak terkesan kaku, peneliti akan mendapatkan data berupa: Potensi pengembangan pariwisata halal di Pulau Bali dalam konsep ekonomi pembangunan Islam.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumenter bisa berbentuk lisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Studi dokumenter merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa dokumenter adalah suatu penanaman untuk memperoleh suatu keterangan atau informasi dari catatan peristiwa yang berupa dokumen.⁵⁸

Tujuan menggunakan teknik ini untuk memperoleh data dan mendokumentasikan penelitian seputar potensi pengembangan

⁵⁸ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2014), 87.

pariwisata halal di Pulau Bali dalam konsep ekonomi pembangunan Islam.

E. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat dengan mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Dalam penelitian ini analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif dan data yang terkumpul akan disajikan dalam bentuk uraian-uraian secara deskriptif. Setelah data diolah dan sebagaimana diuraikan dalam teknik pengolahan data diatas, selanjutnya dilakukan analisis data terhadap permasalahan yang dirumuskan terdahulu, dimana data yang diperoleh dari hasil wawancara oleh responden dibahas secara mendalam dengan mengacu pada landasan teoritis.

Secara rinci langkah-langkah analisis data dapat dilakukan dengan mengikuti cara yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman, yaitu: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, kesimpulan.

1. *Data Collection* (Pengumpulan Data)

Pengumpulan data dilakukan sehari-hari, mungkin berbulan-bulan, sehingga data yang diperoleh akan banyak. Pada tahap awal peneliti melakukan penjelajahan secara umum terhadap situasi sosial/objek yang diteliti, semua yang dilihat dan didengar direkam

semua. Dengan demikian peneliti akan memperoleh data yang sangat banyak dan sangat bervariasi.

2. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih dan memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Reduksi data dapat dibantu dengan peralatan elektronik seperti komputer mini, dengan memberikan kode pada aspek-aspek tertentu.

3. *Data Display* (Penyajian Data)

Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan lebih mudah dipahami pada Analisis Potensi Pengembangan Pariwisata Halal di Pulau Bali dalam Konsep Ekonomi Pembangunan Islam.

4. *Conclusion Drawing/Verification*

Langkah ke empat dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-

bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.⁵⁹

F. Keabsahan Data

Adapun teknik keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu diluar data itu sendiri untuk keperluan pengecekan atau sebagaimana pembanding terhadap data itu. Adapun teknik triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik triangulasi dan sumber. Triangulasi sumber adalah triangulasi yang digunakan untuk menguji kredibilitas data dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.⁶⁰ Dalam penelitian ini peneliti dapat membandingkan hasil wawancara dari masing-masing informan dan memeriksa kembali melalui observasi dan dokumentasi yang diperoleh.

G. Tahap-tahap Penelitian

Langkah dalam setiap kegiatan penelitian adalah laporan penelitian. Dalam hal ini peneliti menulis laporan penelitian, dengan menggunakan rencana penyusunan laporan penelitian yang telah tertera dalam sistematika penulisan laporan. Tahap penelitian hendaknya ada tiga tahapan yang harus dilakukan, yaitu tahapan pra-lapangan, tahap pekerjaan lapangan dan tahap analisis data.

⁵⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2022), 134-142.

⁶⁰ Bambang Sudaryana dan Ricky Agusidy, *Metdologi Penelitian Kuantitatif* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2022), 166-167.

1. Tahap Pra-lapangan

Adapun dalam tahapan ini kegiatan yang harus dilakukan oleh peneliti antara lain :

- 1) Memilih lapangan dengan berbagai pertimbangan.
- 2) Menjajaki lapangan, dalam rangka penyesuaian dengan subjek penelitian. Maksud dan tujuan penjajakan lapangan adalah berusaha mengenal segala unsur lingkungan sosial, fisik dan sebagainya.

2. Tahap Pelaksanaan

Dalam tahapan ini kegiatan yang harus dilakukan oleh peneliti antara lain :

- 1) Mewawancarai informan yang berkaitan dengan pariwisata di Pulau Bali.
- 2) Berperan sambil mengumpulkan data yang berkaitan dengan penelitian yang peneliti lakukan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

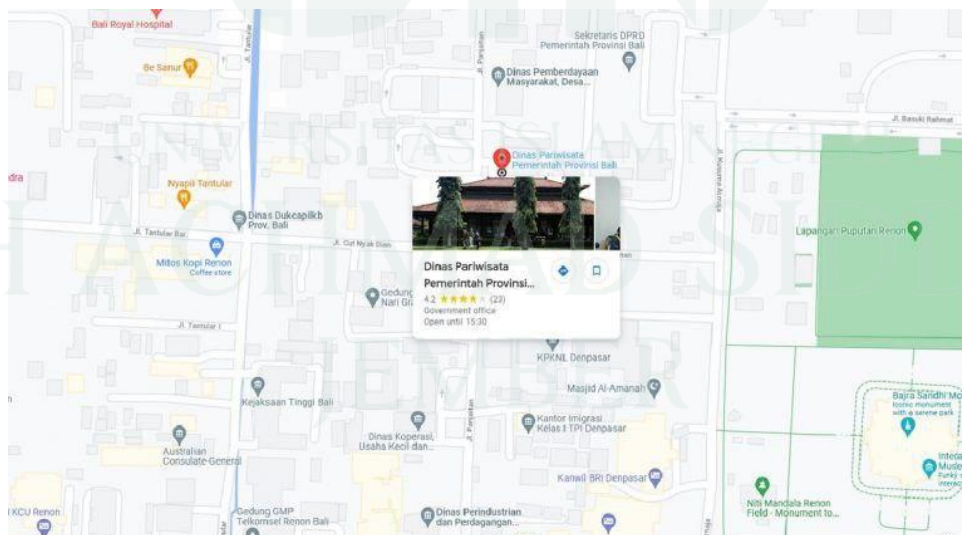
A. Gambaran Objek Penelitian

1. Sejarah Singkat Dinas Pariwisata Provinsi Bali

Dalam tantangan Bali sebagai pusat pengembangan kepariwisataan Indonesia bagian tengah, bagi daerah Bali sektor kepariwisataan merupakan penghasilan utama setelah pertanian. Untuk menangani kepariwisataan, pemerintah daerah tingkat I Bali berdasarkan surat keputusan gubernur kepala daerah tingkat I Bali Nomor: 22.a/Pemb32/I/a/70, membentuk Dinas Pariwisata daerah tingkat I Bali.

2. Letak Geografis

Dinas Pariwisata Provinsi Bali beralamat di Jl. S. Parman Niti Mandala, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Bali 80235.



Gambar 2.1 Denah Dinas Pariwisata Provinsi Bali

(Sumber: diakses pada 7 April 2023, <https://disparda.baliprov.go.id/kedudukan-dan-alamat/>)

3. Visi & Misi

a. Visi

“NANGUN SAT KERTHI LOKA BALI” menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta isinya, untuk mewujudkan kehidupan krama Bali yang sejahtera dan bahagia, sakala-niskala menuju kehidupan krama dan gumi Bali sesuai dengan prinsip trisakti Bung Karno:berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan melalui pembangunan secara terpola, menyeluruh, terencana, terarah, dan terintegrasi dalam bingkai negara kesatuan republik Indonesia berdasarkan nilai-nilai pancasila.

b. Misi

- 1) Memastikan terpenuhinya kebutuhan pangan, sandang, dan papan dalam jumlah dan kualitas yang memadai bagi kehidupan krama Bali.
- 2) Mewujudkan kemandirian pangan, meningkatkan nilai tambah dan daya saing pertanian, dan meningkatkan kesejahteraan petani.
- 3) Mengembangkan sumber daya manusia yang berdaya saing tinggi yaitu berkualitas dan berintegritas: bermutu, profesional dan bermoral serta memiliki jati diri yang kokoh yang dikembangkan berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal krama Bali.

- 4) Memajukan kebudayaan Bali melalui peningkatan perlindungan, pembinaan, pengembangan dan pemanfaatan nilai-nilai adat, agama, tradisi, seni dan budaya krama Bali.
- 5) Mengembangkan destinasi dan produk pariwisata baru berbasis budaya dan berpihak kepada rakyat yang terintegritas antar kabupaten/kota se-Bali.

4. Struktur Organisasi

Didalam sebuah perusahaan struktur organisasi mempunyai arti yang sangat penting untuk mencapai tujuan. Struktur organisasi Dinas Pariwisata Provinsi Bali disusun sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku, pada intinya menjelaskan segala fungsi, kewajiban dan tanggung jawab dari masing-masing bagian yang ditempati.



Gambar 3.1 Struktur Organisasi
(Sumber: Dinas Pariwisata Provinsi Bali)

B. Penyajian Data dan Analisis

Penyajian data dan analisis merupakan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti di Dinas Pariwisata Provinsi Bali dengan menggunakan metode pengumpulan data, yaitu berupa observasi, wawancara, dokumentasi. Selanjutnya data dari hasil lapangan dianalisis secara detail sehingga akan menghasilkan beberapa temuan. Diantara beberapa temuan tersebut secara garis besar mengacu pada fokus masalah sebagai berikut:

1. Potensi pengembangan pariwisata halal di pulau Bali dalam konsep ekonomi pembangunan Islam.

Pengembangan pariwisata halal di pulau Bali sudah menjadi hal yang biasa. Artinya, hal tersebut bukanlah suatu hal yang baru. Pariwisata halal ini dijalankan oleh para pelaku industri yang memiliki segmentasi pasar atau target konsumennya kepada para wisatawan turis Muslim dan juga masyarakat yang beragama Muslim.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara beberapa informan, terdapat 4 informan yang dapat memberikan informasi secara lisan dan dibuktikan dengan adanya data yang diperoleh dari observasi, dokumen maupun halaman website Dinas Pariwisata Provinsi Bali.

a. Daya tarik (*attraction*)

Sebuah pariwisata mampu menarik kedatangan para wisatawan karena hal tersebut didukung oleh daya tarik yang

dimiliki wisata itu sendiri . Bali khususnya, dengan budaya yang mengusung tema kearifan lokal mampu menarik wisatawan untuk datang berkunjung. Daya tarik yang dimiliki lebih pada keunikan budaya, dimana hal tersebut mengacu pada kesenian masyarakat Bali. Namun, seperti yang diketahui bahwa di Bali terdapat banyak masyarakat Muslim menyebar disetiap daerah. Meskipun mayoritas masyarakat Bali merupakan umat Hindu. Tanpa melarang ataupun membatasi, umat Muslim dapat melaksanakan aktivitas keagamaan dengan sebagaimana mestinya. Seperti halnya di kampung gelgel. Kampung ini merupakan salah satu kampung umat Muslim yang terdapat di Bali. Masyarakat umat Muslim biasanya masih menjalankan kesenian rudat, dan hal tersebut mampu membuat kampung tersebut didatangi wisatawan asing. Dengan itu, wisatawan umat Muslim juga dapat menikmati makanan dan minuman halal yang telah disediakan. Hal ini didukung juga dengan data yang diperoleh dari website milik Dinas Pariwisata Provinsi Bali, serta hasil wawancara.

Hasil wawancara dengan Ibu Niluh Herawati selaku adyatama kepariwisataan dan ekonomi kreatif ahli muda/sub koordinator unit substansi standar dan sertifikasi usaha di Dinas Pariwisata Bali.

“Pariwisata kita kan berbasis budaya, pastinya pariwisata kita menawarkan wisata yang aman, sehat, nyaman, bersih. Untuk daya tarik yang dimiliki pastinya budaya Bali itu sendiri, hubungan antara masyarakatnya yang unik.

Meskipun pariwisata kita memiliki konsep pariwisata budaya Bali hal tersebut tidak membatasi ataupun melarang para pelaku pariwisata yang mengembangkan pariwisata halal. Kami menyerahkan secara penuh kepada para pelaku industri, untuk yang menjadi daya tarik pariwisata halal sendiri ialah produk ataupun barang yang nantinya dijual memiliki sertifikasi halal dari MUI.”⁶¹

Hasil wawancara dengan Bapak I Ketut Yadnya Winarta selaku sub koordinator promosi di Dinas Pariwisata Provinsi Bali.

“Daya tarik budaya Bali sendiri lebih mengarah kepada kesenian adat. Beberapa daerah yang terdapat di Bali memiliki adat istiadat yang sangat khas. Seperti contohnya di Uluwatu, wisata di pantai Uluwatu sendiri dapat menampilkan tarian Kecak pada saat wisatawan berkunjung. Tanpa disadari, hal tersebut juga salah satu cara kami dalam mempromosikan pariwisata yang ada di Bali. Sedangkan untuk pariwisata halal sendiri yang menjadi daya tarik salah satunya yaitu sertifikasi halal MUI yang dimiliki oleh para pelaku wisata.”⁶²

Hasil wawancara dengan mas Noval selaku staff pelayanan bagian umum.

“Berbicara mengenai daya tarik wisata Bali maka tidak jauh dengan budayanya yang dimiliki. Mungkin bagi para wisatawan, canang- canang bekas sembahyang yang ada di jalan-jalan ataupun dimanapun tempatnya hal tersebut menjadi hal unik bagi mereka. Di Bali sendiri juga toleransinya sangat tinggi sekali, dimana kami tidak pernah melarang kegiatan keagamaan selain agama hindu, kita semua dapat menerima dan saling menghormati satu sama lain. Mengenai isu pariwisata halal yang ramai diberitakan, Bali sendiri sejak dahulu tanpa belum adanya isu pun sudah menjalankan pariwisata halal, karena didalamnya para pemangku pariwisata halal dapat bebas berekspresi dalam menjalankan usahanya.”⁶³

⁶¹ Ibu Herawati, diwawancarai oleh penulis, 04 Mei 2023.

⁶² Bapak Ketut, diwawancarai oleh penulis, 04 Mei 2023.

⁶³ Mas Noval, diwawancarai oleh penulis, 01 Februari 2023.



4.1 Gambar Hasil Dokumentasi dari Dinas Pariwisata Provinsi Bali

(Sumber: Dokumentasi Dinas Pariwisata Provinsi Bali)

Hasil wawancara dengan Dwi Susanti selaku wisatawan yang berkunjung ke Bali.

“waktu saya berkunjung ke pantai kuta, saya benar-benar tidak pernah merasakan suasana yang sangat unik. Di area pantai ini sangat beragam sekali yang ditawarkan. Seperti halnya kepang rambut, tatto, ataupun pijat. Ternyata saya juga menemukan orang yang berjualan rujak lontong, dan kebetulan ibu-ibu penjualnya berasal dari daerah yang sama dengan saya. Pada saat saya ingin melaksanakan sholat ashur, saya bertanya kepada bapak-bapak yang menjaga area parkir, lalu saya diberitahu bahwa di dekat pos penjagaan terdapat ruangan yang bisa digunakan untuk melaksanakan ibadah.”⁶⁴

Berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi daya tarik yang dimiliki oleh pariwisata Bali ialah budaya Bali itu sendiri. Yang membedakan dengan budaya lain, yang memiliki ke khasan yang unik didalamnya. Sedangkan untuk pariwisata halal, dimana sertifikasi halal dari MUI menjadi acuan atau daya tarik tersendiri bagi seorang wisatawan yang sedang berkunjung. Hampir di seluruh destinasi wisata yang ada di Bali, para pelaku wisatanya juga banyak yang beragamakan Muslim. Dengan itu, para

⁶⁴ Dwi Susanti, diwawancarai oleh penulis, 14 Juni 2023.

wisatawan tidak khawatir akan salah dalam mengonsumsi makanan ataupun minuman tidak halal.

b. Akomodasi (*amenity*)

Dalam sebuah perjalanan pariwisata, akomodasi menjadi salah satu fasilitas yang harus tersedia. Karena, wisatawan dapat beristirahat serta memenuhi aktivitas kegiatan sehari-hari seperti halnya ibadah dapat dilakukan dengan memanfaatkan akomodasi yang telah disediakan. Bali sendiri sudah menyiapkan hal tersebut, para wisatawan dapat menikmati perjalanan wisatanya dan juga melaksanakan ibadahnya dengan nyaman serta aman. Akomodasi tidak hanya berupa fasilitas untuk beristirahat maupun ibadah, akomodasi juga dapat berupa makanan maupun minuman halal bagi wisatawan Muslim khususnya.

Hasil wawancara dengan Ibu Niluh Herawati selaku adyatama kepariwisataan dan ekonomi kreatif ahli muda/sub koordinator unit substansi standar dan sertifikasi usaha di Dinas Pariwisata Bali.

“Banyak kok restaurant yang memiliki sertifikasi halal, dan juga hotel-hotel yang ramah bagi turis Muslim pastinya. Seperti yang saya katakan tadi, itu semua tergantung bagaimana mereka mentargetkan konsumennya, tergantung pada *supply* dan *demand* nya. Untuk fasilitas yang memudahkan dalam beribadah bagi umat Muslim pastinya juga sudah kita pikirkan. Jadi, di setiap destinasi wisata sudah kita sediakan fasilitas yang memudahkan untuk melaksanakan ibadah. Untuk destinasi pariwisata di Bali sendiri pastinya sudah memenuhi standar baik itu sarana maupun prasarana, juga dari kelembagaan wisata

nya semua sudah harus memenuhi standar. Karena hal tersebut sudah terdapat di regulasi perda”⁶⁵

Berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi, bahwasannya di seluruh destinasi pariwisata di Bali baik sarana maupun prasarana untuk menunjang fasilitas ibadah umat Muslim khususnya, sudah mampu terpenuhi. Adapun beberapa data destinasi pariwisata dari sembilan kabupaten yang ada di Bali sebagai berikut : 1) Badung : Pura Uluwatu, Pantai Jimbaran, Pantai Kuta, Pantai Nusa Dua, Pantai Pandawa, Tirta Taman Mumbul, Water Blow Nusa Dua, Pantai Green Bowl, Sangeh Monkey Forest, Garuda Wisnu Kencana, 2) Buleleng : Air Terjun Gitgit, Air Saneh, Pantai Lovina, Pelabuhan Buleleng, 3) Bangli : Gunung Batur, Danau Batur, Pura Keihen, Pura Batur, Air Terjun Cepung, Trunyan Village, 4) Denpasar : Monumen Perjuangan Rakyat Bali, Pantai Sanur, 5) Gianyar : Tirta Empul, Kelili Rice Terrace, Ceking Rice Terrace, Tegenungan Waterfall, Pura Gunung Kawi, Elephant Cave Temple, 6) Jembrana : Pantai Perancak, Palasari DAM, Pantai Medewi, Gilimanuk Bay, Bunut Bolong Trees, 7) Karangasem: Karangasem Agung Palace, Edelweis Garden, Pura Lempuyang, Camping Bukit Asah, Pantai Virgin, Taman Ajung, Tenganan Village, Pura Besakih, Tirta Gangga, 8) Klungkung : Pantai Lembongan, Pantai Kelingking, Japanese Cave, Kerta Gosa, 9) Tabanan : Margarana Herpes Cemetery, Angseri Hot Spring Water, Jatiluwih Terraces, Pura Tanah Lot, Pura Danau Beratan.⁶⁶

Hasil wawancara dengan mas Noval selaku staff bagian pelayanan umum.

“yang datang ke bali kan banyak ya, hampir dari seluruh penjuru dunia berkunjung ke Bali. Banyak juga turis-turis Muslim yang dari Maroko contohnya otomatis kan sebagai orang Muslim pasti minta nya makanan dan minuman yang disediakan Halal. Jadi kita sebagai pemangku wisata harus memenuhi permintaan wisatawan tersebut. dan untuk pemenuhan kebutuhan itu kita sama sekali tidak merasa kerepotan, karena ya di Bali sendiri sudah banyak sekali rumah makan yang ramah Muslim.”⁶⁷

⁶⁵ Ibu Herawati, diwawancarai oleh penulis, 04 Mei 2023.

⁶⁶ diakses pada 8 september 2023

<https://disparda.baliprov.go.id/?page=6209&action=viewvideo&id=6209&pageno=1&language=id>

⁶⁷ Mas Noval, diwawancarai oleh penulis, 01 Februari 2023.

Berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi tersebut bahwa restaurant dengan sertifikasi Halal dari MUI sudah menjadi hal yang biasa di Bali. Bahkan pengunjung nya bukan hanya dari masyarakat yang beragamakan Muslim saja. Halal bagi seorang Muslim adalah sebuah patokan atau landasan yang memang harus dipenuhi adanya sebagai umat Muslim. Sedangkan bagi seorang non-Muslim Halal merupakan suatu bentuk kebersihan dan keamanan terhadap suatu makanan atau pun minuman yang mereka konsumsi. Pernyataan diatas juga di dukung oleh data yang diperoleh dari website restaurant tersebut, berikut salah satu gambar restaurant dan hotel yang bersertifikasi Halal MUI.



Gambar 5.1 Restaurant dan Hotel The Rhadana Kuta

(Sumber: diakses pada 6 Mei 2023

<https://www.rhadana.com/services-facilities/#al-riend-musholla>)

c. Transportasi (*accessibility*)

Transportasi menjadi salah satu pokok utama dalam destinasi wisata. Karena untuk memudahkan wisatawan dalam memenuhi kegiatan wisatanya maka harus ada akses yang memudahkan. Dalam pariwisata Bali, model transportasi jenis roda dua maupun roda empat sudah mampu terpenuhi dengan

baik. Maka, wisatawan tidak perlu khawatir pada saat sedang berwisata tidak akan terpenuhi kegiatan wisatanya. Hal ini didukung oleh hasil wawancara dan observasi yang telah dilakukan oleh peneliti.



6.1 Observasi Destinasi Wisata Kintamani, 23 April 2023

Hasil wawancara dengan Ibu Niluh Herawati selaku adyatama kepariwisataan dan ekonomi kreatif ahli muda/sub koordinator unit substansi standar dan sertifikasi usaha di Dinas Pariwisata Bali.

“Untuk pengembangan pariwisata kan dilihat dari tiga aspek ya, dimana harus ada aksesibilitas, usaha destinasi atau daya tarik, terus atraksi. Harus ada kegiatan atraksi wisatanya apa. Terus transportasi, sarana dan prasarannya. Transportasi untuk wisata di Bali juga sudah gampang. Tentu untuk transportasi yang digunakan harus memenuhi standar dan harus memiliki izin. Kalo transportasi yang dari biro perjalanan yang diatur sama biro harus memenuhi aturan yang ada.”⁶⁸

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi mengenai transportasi, hal tersebut sudah dipastikan adanya dengan sangat baik. Karena transportasi menjadi suatu syarat agar sebuah

⁶⁸ Ibu Herawati, diwawancarai penulis, 04 Mei 2023.

destinasi pariwisata sebagai mana mestinya dalam memudahkan akses bagi para pengunjung pariwisata.

d. Fasilitas penunjang (*ancinllary services*)

Selain akomodasi, fasilitas penunjang dalam destinasi wisata harus terpenuhi dengan baik. Fasilitas penunjang ini bisa berupa tempat ibadah, UKS atau klinik maupun rumah sakit terdekat agar jika terjadi sesuatu yang menimpa wisatawan tidak perlu khawatir untuk melakukan pertolongan pertama. Para pelaku pariwisata di Bali sudah menyediakan fasilitas pendukung yang di butuhkan, hal ini dilakukan agar wisatawan merasa aman dan nyaman pada saat sedang berwisata. Tempat penukaran mata uang asing juga menjadi salah satu fasilitas penunjang yang harus tersedia. Hal ini juga dibuktikan dengan hasil wawancara dan observasi yang telah dilakukan oleh peneliti.

Hasil wawancara dengan Ibu Niluh Herawati selaku adyatama kepariwisataan dan ekonomi kreatif ahli muda/sub koordinator unit substansi standar dan sertifikasi usaha di Dinas Pariwisata Bali.

“Saya rasa untuk fasilitas pendukung untuk pariwisata sudah mampu terpenuhi semua baik itu mengacu pada pariwisata Halal. Karena di dalam pariwisata itu sendiri untuk menjadi sebuah destinasi wisata fasilitas pendukung harus terpenuhi secara baik.”⁶⁹

⁶⁹ Ibu Herawati, diwawancarai oleh penulis, 04 Mei 2023.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, fasilitas penunjang sudah tersedia dengan baik. Wisatawan yang sedang berlibur tidak perlu merasa bingung jika memerlukan suatu hal yang dibutuhkan. Karena para pemangku wisata di Bali sudah memfasilitasi segala kebutuhan yang diperlukan oleh wisatawan.

e. Kelembagaan (*institutions*)

Pemerintah memiliki peran sangat penting dalam sebuah perkembangan pariwisata. Pemerintah juga memiliki wewenang dalam mengatur, merencanakan, mengawasi, serta memberikan anggaran dalam sebuah pariwisata. Namun, Bali sendiri untuk sebuah pariwisata Halal masih belum ada regulasi yang melandasi hal tersebut. Untuk itu, hal ini dibuktikan dari hasil wawancara serta dokumen yang diperoleh dari Dinas Pariwisata Provinsi Bali.

Hasil wawancara dengan Ibu Niluh Herawati selaku adyatama kepariwisataan dan ekonomi kreatif ahli muda/sub koordinator unit substansi standar dan sertifikasi usaha di Dinas Pariwisata Bali.

“Di Bali sendiri, pemerintah hanya mengeluarkan perda dalam bentuk pariwisata yang berbasis budaya. Dan untuk pariwisata Halal, kami tidak mengeluarkan perda terkait itu. Seperti yang saya bilang di awal, meskipun pariwisata Halal tidak terdapat dalam perda, akan tetapi pariwisata tersebut tetap berjalan sebagai mana mestinya. Kami menyerahkan e cara penuh tanpa memberi batasan ataupun larangan terhadap para pelaku pariwisata yang menjalankan pariwisata Halal.”⁷⁰

⁷⁰ Ibu Herawati, diwawancarai oleh penulis, 04 Mei 2023.

Hasil wawancara dengan Bapak I Ketut Yadnya Winarta selaku sub koordinator promosi di Dinas Pariwisata Provinsi Bali.

“Dinas pariwisata sendiri tidak merencanakan atau membuat strategi bagaimana pengembangan pariwisata Halal, karena dari pemerintah sendiri tidak ada anjuran dan kami juga tidak diberi anggaran untuk hal itu. Jadi, untuk pariwisata Halal kami serahkan kepada para pelaku-pelaku industri nya secara langsung.”⁷¹

Berdasarkan hasil wawancara mengenai regulasi pemerintah dalam pengembangan pariwisata Halal. Secara umum pengembangan pariwisata Halal di Bali berjalan sangat baik, akan tetapi hal tersebut belum terlalu resmi karena tidak adanya regulasi yang mengatur untuk pengembangan pariwisata Halal.

C. Pembahasan Temuan

Setelah melakukan penelitian ditemukan bahwa pengembangan pariwisata Halal di pulau Bali berjalan sangat baik dengan semestinya. Dimana proses nya di pegang penuh oleh para pelaku pariwisata yang menjalankan. Seperti yang diketahui, Bali sendiri menjalankan pariwisata dengan konsep pariwisata yang berbasis budaya Bali. Hal tersebut bukanlah salah satu kendala yang menghalangi adanya pengembangan pariwisata Halal. Justru sebaliknya, dimana didalam pariwisata yang ada di Bali terdapat kolaborasi antara pariwisata budaya dengan pariwisata Halal. Jadi, para wisatawan dapat menikmati atraksi budaya yang ada pada pariwisata Bali serta bagi wisatawan Muslim mereka dapat mengkonsumsi makanan dan minuman tanpa harus mengkhawatirkan

⁷¹ Bapak Ketut, diwawancarai oleh penulis, 04 Mei 2023.

kehalalannya. Seperti teori yang dikemukakan oleh John Fletcher dan David Gilbert (2018) destinasi pariwisata paling tidak harus mencakup komponen-komponen utama sebagai berikut:

1. Objek dan Daya Tarik: Berdasarkan hasil temuan lapangan keunikan budaya Bali menjadi salah satu daya tarik yang dimiliki oleh pariwisata tersebut. Sedangkan untuk pariwisata Halal sendiri, label Halal MUI menjadi daya tarik paling utama bagi wisatawan yang ingin berkunjung. Meskipun target para pelaku industri pariwisata Halal ialah wisatawan Muslim. Akan tetapi, banyak dari mereka yang berkunjung bahkan wisatawan non-Muslim. Karena bagi mereka Halal merupakan jaminan keamanan dan kebersihan suatu produk, baik itu makanan ataupun minuman. Menurut John Fletcher dan David Gilbert kemampuan mereka untuk menarik pengunjung adalah manfaat utama mereka contohnya dengan daya tarik yang biasa digunakan berbasis utama pada kekayaan alam maupun budaya.⁷² Seperti yang ada di destinasi wisata pantai uluwatu, para pelaku seni budaya menampilkan tari kecak di area pasir pantai. Hal tersebut merupakan salah satu cara menunjukkan budaya yang dimiliki oleh Bali. Sedangkan menurut GMTI, terdapat tiga kelompok kriteria wisata Halal. Salah satunya yaitu destinasi yang ramah keluarga.⁷³ Di Bali sendiri terdapat hotel Bayt Kaboki, hotel ini merupakan hotel

⁷² John Fletcher and David Gilbert, *Tourism Principle and Practice* (British: Library of Congress Cataloging, 2018), 309.

⁷³ Faizul Abrori, *Pariwisata Halal dan Peningkatan Kesejahteraan* (Malang: Literasi Nusantara, 2020.), 14.

yang sangat menghargai pentingnya institusi keluarga, sehingga hanya mengizinkan mereka yang terikat hubungan pernikahan atau keluarga untuk menginap. Dari dua teori tersebut dan dengan hasil penelitian, Bali mampu memenuhi daya tarik wisatawan baik itu pariwisata budaya maupun pariwisata Halal.

2. Akomodasi (*Amenity*): Berdasarkan hasil temuan lapangan destinasi pariwisata yang memenuhi kriteria standar merupakan destinasi yang menyediakan akomodasi dengan baik. Di Bali sendiri, sudah terdapat akomodasi yang lengkap dan dapat memudahkan wisatawannya dalam memenuhi aktivitas sehari-hari. Akomodasi ini menyediakan fasilitas ibadah bagi umat Muslim serta menyediakan makanan dan minuman yang sudah terjamin kehalalannya. Di semua destinasi wisata yang ada di Bali, sudah terdapat fasilitas ibadah bagi umat Muslim dan sudah tersedia makanan serta minuman Halal. Menurut GMTI akses ibadah yang mudah dan baik⁷⁴ maka hal tersebut sudah memenuhi kebutuhan wisatawan Muslim khususnya. Para pemangku pariwisata di Bali sudah menyiapkan segala kebutuhan wisatawannya termasuk tempat ibadah. Fasilitas ibadah ini juga terdapat di wilayah fungsional seperti terminal, bandara, serta pelabuhan. Dari teori serta hasil penelitian, bahwasannya Bali mampu memenuhi pariwisata Halal dalam sebuah akomodasi pariwisata.

⁷⁴ Faizul Abrori, *Pariwisata Halal dan Peningkatan Kesejahteraan* (Malang: Literasi Nusantara, 2020.), 14.

3. Transportasi (*Accessibility*): Berdasarkan hasil temuan lapangan dalam sebuah destinasi wisata terdapat akses yang memudahkan untuk perjalanan wisata. Dengan menawarkan jasa transportasi, wisatawan sudah dapat menikmati perjalanannya dengan aman dan nyaman. Karena hal tersebut sudah mendapat izin dari biro perjalanan yang mengatur sebuah transportasi bagi para wisatawan. Menurut John Fletcher dan David Gilbert kontribusi transportasi yang paling penting adalah sebagai sarana transit antara daerah asal wisata utama dengan daerah tujuan.⁷⁵ Kintamani merupakan destinasi wisata yang jalannya harus di tempuh menggunakan mobil *offroad*, di pinggiran jalan tepatnya terdapat banyak masyarakat yang menyewakan mobil *offroad* untuk dipergunakan para wisatawan yang sedang berkunjung. Masyarakat yang memiliki usaha penyewaan mobil *offroad* harus memiliki izin kepada biro perjalanan agar para wisatawan yang menyewa dapat mengendarai dengan nyaman dan aman. Dari tepri dan hasil penelitian, menunjukkan bahwa Bali mampu memenuhi indikator pariwisata Halal.
4. Fasilitas Penunjang (*Ancillary Services*): Berdasarkan hasil temuan lapangan, fasilitas penunjang di seluruh destinasi wisata Bali sudah terpenuhi dengan baik. Contohnya seperti di Bedugul, disana terdapat musholla yang memudahkan umat Muslim dalam melaksanakan ibadahnya. Menurut GMTI pariwisata Halal harus ada jangkauan dan

⁷⁵ John Fletcher and David Gilbert, *Tourism Principle and Practice* (British: Library of Congress Cataloging, 2018), 409.

kesadaran kebutuhan wisatawan Muslim.⁷⁶ Fasilitas penunjang ini tidak hanya mengenai tempat ibadah, akan tetapi juga terkait makanan dan minuman yang dikonsumsi wisatawan nya harus Halal. Wisatawan juga dapat menanyakan arah kiblat kepada para pemangku wisata yang ada di destinasi wisata. Dari teori dan hasil penelitian bahwasannya Bali mampu menjalankan konsep pariwisata Halal.

5. Kelembagaan (*Institutions*): Berdasarkan hasil temuan lapangan, di Bali sendiri pemerintah tidak mengeluarkan regulasi mengenai pariwisata Halal. Untuk pariwisata Halal sendiri masih berjalan sebagai mana mestinya tanpa merugikan pihak manapun. Dan pemerintah Bali sendiri, tidak memberikan batasan maupun larangan terhadap para pelaku pariwisata Halal. Menurut John Fletcher dan David Gilbert pemerintah dan kerangka kerja administrasi publik yang sesuai diberlakukan. Sebagai aturan, semakin besar pentingnya pariwisata bagi perekonomian suatu negara, semakin besar keterlibatan sektor publik, hingga memiliki kementerian pemerintah yang bertanggung jawab penuh atas pariwisata.⁷⁷ Dari teori dan hasil penelitian bahwasannya pemerintah Bali dapat menjalankan adanya pariwisata Halal, hanya saja hal tersebut tidak terdapat pada peraturan pemerintah.

⁷⁶ Faizul Abrori, *Pariwisata Halal dan Peningkatan Kesejahteraan* (Malang: Literasi Nusantara, 2020.), 14.

⁷⁷ John Fletcher and David Gilbert, *Tourism Principle and Practice* (British: Library of Congress Cataloging, 2018), 448.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam teori yang dikemukakan oleh John Fletcher dan David Gilbert, Bali mampu menjalankan adanya pariwisata Halal. Pariwisata Halal di pegang penuh oleh para pelaku industri yang memiliki target wisatawan Muslim. Pemerintah Bali juga tidak melarang ataupun membatasi kegiatan pariwisata Halal.

Untuk fasilitas penunjang dan berbagai akomodasi pariwisata halal di Bali sudah terpenuhi dengan Baik. Dimana didalamnya sudah terdapat fasilitas yang memudahkan umat Muslim untuk melaksanakan ibadahnya, dan juga tidak khawatir akan mengkonsumsi makanan dan minuman non-Halal.

B. Saran

1. Bagi Pariwisata Bali

Saran yang dapat peneliti sampaikan terkait dengan penelitian pengembangan pariwisata Halal di pulau Bali. Bagi Dinas Pariwisata Provinsi Bali khususnya, pemerintah seharusnya mengeluarkan regulasi yang mengatur mengenai pariwisata Halal. Agar pariwisata Halal tersebut lebih berkembang dan berinovasi dibawah pengawasan pemerintah Bali dengan resmi. Hal ini juga merupakan salah satu strategi dalam menarik pengunjung lebih banyak lagi. Terlebih lagi, Halal merupakan trend terbaru dalam dunia pariwisata.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Karena dirasa penelitian ini kurang sempurna maka diharapkan untuk peneliti selanjutnya, Dinas Pariwisata Provinsi Bali ini dijadikan sebagai objek penelitian untuk upaya penyempurnaan penelitian ini baik bagi peneliti yang bersangkutan maupun oleh peneliti lain sehingga kegiatan penelitian dapat dilakukan secara berkesinambungan.



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

DAFTAR PUSTAKA

- Abrori, Faizul. *Pariwisata Halal dan Peningkatan Kesejahteraan*, Malang : Literasi Nusantara , 2020.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial Dan Ekonomi*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Bustamam, Nawarti Susi Suryani. “Potensi Pengembangan Pariwisata Halal dan Dampaknya Terhadap Pembangunan Ekonomi Daerah Provinsi Riau”, Universitas Islam Riau, *Jurnal Ekonomi KIAM* 32 No. 2 Desember 2021.
- Dayanti, Dwi Astri Amalia Fiqia Wandhini. “Halal Tourism In Bali : Pengaruh dan Tantangan Mengembangkan Wisata Halal di Bali”, IAIN Salatiga, *Jurnal Ekonomi Syariah* 2 No. 2 Oktober 2019.
- Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003.
- Firdaus, Prananda. “Pengaruh Pariwisata Halal Terhadap Loyalitas Wisatawan Muslim Untuk Mengunjungi Bali” Skripsi, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2022.
- Futaqi, Ahmad Nijla Syifyamal Ulya. “Analisis Pengembangan Potensi Ekonomi Pariwisata Religi di Masjid Jami’ Tegalsari Ponorogo”, IAIN Ponorogo, *Journal of Economics and Business Research* 2 No. 1 Januari-Juni 2022.
- Harahap, Ramdani Ahmad Ahmad Suminto. “Ekonomi dalam Pandangan Islam : Serta Perannya dalam Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Ekonomi Pembangunan Islam”, Universitas Darussalam Gontor, *Journal of Sharia and Economic Law* 1 No. 1 Juni 2021.
- Jannah, Sari Raudhatul. “Analisis Pengaruh Image Destinasi Wisata Halal, Atraksi Budaya dan Aksebilitas Terhadap Kepuasan Wisatawan Domestik di Aceh” Tesis, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2022.
- John Fletcher and David Gilbert, *Tourism Principle and Practice* (British: Library of Congress Cataloging, 2018.
- Kurniawan, Muhammad Heni Noviarita. “Analisis Halal Tourism dalam Meningkatkan Laju Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Lampung”,

- UIN Raden Intan Lampung, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7 No. 1 2021.
- Mahri, A. Jajang W. *Ekonomi Pembangunan Islam*, Jakarta : Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah-Bank Indonesia, 2021.
- Maulana, Naufal Achmad. “Regulasi Pariwisata Halal di Provinsi Bali Studi Terhadap Regulasi dalam Praktek Wisata” Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022.
- Mahadewi, Ni Md. Anggita S, “Analisis Media Berita Online Tentang Pengembangan Wisata Syariah di Pulau Bali dalam Kajian Sosiologi Pembangunan”, Universitas Udayana, *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 7 No. 1, 2018
- Nasution, Salman. “Konsep Pariwisata Halal Berbasis Ekonomi Kreatif Dengan Sharia Regulation dalam Meningkatkan Pendapatan dan Kesejahteraan Masyarakat di Sumatera Utara”, Universitas Muhammdiyah Sumatera Utara, *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis* 21 No. 2 2021.
- Nengah, I Subadra, “Pariwisata Budaya dan Pandemi Covid-19: Memahami Kebijakan Pemerintah dan Reaksi Masyarakat Bali”, Universitas Udayana, *Jurnal Kajian Bali* 11 NO. 01 April 2021.
- Nurlatifah, Ida. “Kebijakan Pengembangan Pariwisata Halal di Indonesia : Peluang, Tantangan, dan Strategi” Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020.
- Pedoman Karya Tulis Ilmiah*, Jember: IAIN, 2019.
- Ruminda, Ujang Suyatman. “Pengembangan Muslim Friendly Tourism dalam Konsep Pariwisata Budaya di Pulau Dewata”. UIN Sunan Gunung Djati Bandung 2019.
- Setiawan, Rifky dan Muhammad Mirza Pahlevi, “Potensi Perkembangan Halal Food di Denpasar Bali”, Universitas Nasional, *Jurnal Imiah Pariwisata* 19 No. 1, 2023.
- Saputri, Inten Eqa. “Analisis Potensi Pengembangan Wisata Halal Sebagai Lapangan Kerja Baru Untuk Peningkatan Ekonomi Masyarakat Studi Obyek Wisata Pantai Seruni Bantaeng” Skripsi, Universitas Muhammdiyah Makassar, 2020.
- Sudaryana, Sudaryana dan Ricky Agusidy, *Metdologi Penelitian Kuantitatif* Yogyakarta: CV Budi Utama, 2022.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung : Alfabeta, 2014).

Surur, Fadhil. *Wisata Halal : Konsep dan Aplikasi*, Samata, Kabupaten Gowa : UPT Perpustakaan UIN Alauddin, 2020.

Syamsuri, Soritua Ahmad Ramdani Harahap. “Pandangan Khursyid Ahmad Terhadap Efektivitas Sumber Daya Manusia dalam Pembangunan Ekonomi Islam”, Universitas Darussalam Gontor, *Jurnal Ekonomi Syariah* 06 No. 02 Oktober 2019.



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

LAMPIRAN 1

Surat Keaslian Tulisan

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Shelda Moena Aprilita

NIM : E20192081

Prodi : Ekonomi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Universitas : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini dengan judul "*Analisis Potensi Pengembangan Pariwisata Halal di Pulau Bali dalam Konsep Ekonomi Pembangunan Islam*" bukan merupakan hasil plagiat dan benar-benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai mana mestinya.

Jember, 10 Juli 2023


MELERAI
TEMPEL
CC0AJX460213285
Shelda Moena Aprilita

E20192081

Lampiran 2

MATRIKS PENELITIAN

Judul	Variabel	Indikator	Sumber Data	Metode Penelitian	Rumusan Masalah
Analisis Potensi Pengembangan Pariwisata Halal di Pulau Bali dalam Ekonomi Pembangunan Islam	1. Analisis potensi pengembangan pariwisata halal 2. Ekonomi pembangunan Islam	1. Potensi pengembangan pariwisata halal a. Definisi pengembangan pariwisata b. Indikator pariwisata halal c. Ruang lingkup pariwisata halal 2. Ekonomi pembangunan Islam a. Pengertian ekonomi pembangunan Islam b. Indikator pembangunan dalam perspektif ekonomi Islam c. Orientasi pembangunan dalam Islam	1. Sumber data primer a. Adyatama kepariwisataan dan ekonomi kreatif ahli muda/sub koordinator unit substansi standar dan sertifikasi usaha b. Sub koordinator unit substansi promosi 2. Sumber data sekunder a. Buku b. Dokumen c. Jurnal d. Internet	1. Pendekatan penelitian kualitatif 2. Penentuan subjek penelitian: a. Purposive 3. Teknik pengumpulan data: a. Observasi b. Wawancara c. Dokumentasi 4. Metode analisis data: a. Pengumpulan data b. Reduksi data c. Penyajian data d. Kesimpulan 5. Teknik keabsahan data: a. Triangulasi sumber	1. Bagaimana pengembangan pariwisata halal dalam konsep ekonomi pembangunan Islam ?

Lampiran: 3

PEDOMAN PENELITIAN

A. Pedoman Observasi

1. Letak geografis dan keadaan lokasi penelitian yaitu di Dinas Pariwisata Provinsi Bali
2. Keadaan destinasi wisata

B. Pedoman Wawancara

a) Daya tarik (*attractions*)

- 1). Apa bentuk wisata yang ditawarkan?
- 2). Apa yang membedakan dengan wisata lain?

b) Akomodasi (*amenity*)

- 3). Apakah tersedia restoran yang bersertifikasi halal?
- 4). Apakah tersedia fasilitas yang memudahkan untuk beribadah seperti masjid/musholla?

c) Transportasi (*accessibility*)

- 5). Seperti apa jenis transportasi yang ditawarkan kepada wisatawan?
- 6). Apakah ada kebijakan terkait syarat dan ketentuan tertentu kepada wisatawan yang menggunakan jasa transportasi?

d) Fasilitas pendukung (*ancillary services*)

- 7). Apa saja fasilitas yang sudah ada sebagai bentuk pengembangan pariwisata halal?
- 8). Fasilitas pendukung apa yang masih belum terpenuhi dalam pengembangan pariwisata halal?

e) Kelembagaan (*institutions*)

- 9). Apakah ada regulasi terkait pariwisata halal yang berupa peraturan gubernur?
- 10). Apakah di dispar sendiri terdapat renstra terkait pariwisata halal?

C. Pedoman Dokumentasi





1. Sejarah berdirinya Dinas Pariwisata Provinsi Bali
2. Visi dan misi Dinas Pariwisata Provinsi Bali
3. Struktur organisasi Dinas Pariwisata Provinsi Bali

Lampiran 4

Jurnal Kegiatan Penelitian

Nama : Shelda Moena Aprilita
NIM : E20192081
Program Studi : Ekonomi Syariah
Judul : Analisis Potensi Pengembangan Pariwisata Halal di Pulau Bali dalam Konsep Ekonomi Pembangunan Islam

Jurnal Kegiatan Penelitian Skripsi di Dinas Pariwisata Provinsi Bali

No	Hari/Tanggal	Uraian	Paraf
1	Rabu, 01 Februari 2023	Observasi awal dan izin penelitian kepada pihak Dinas Pariwisata Provinsi Bali	
2	Kamis, 27 April 2023	Penyerahan surat izin penelitian kepada kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali	
3	Kamis, 04 Mei 2023	Wawancara kepada adyatama kepariwisataan dan ekonomi kreatif ahli muda/sub koordinator unit substansi standar dan sertifikasi usaha Ibu Niluh Herawati, SS., M. Par	
4	Kamis, 04 Mei 2023	Wawancara kepada sub koordinator unit substansi promosi Bapak I Ketut Yadnya Winarta, SS., M. Par	
5	Kamis, 04 Mei 2023	Meminta surat keterangan bahwa telah selesai melakukan penelitian di Dinas Pariwisata Provinsi Bali	
6	Jum'at, 26 Mei 2023	Melengkapi data yang di rasa masih kurang, baik observasi, wawancara, dokumentasi	

Bali, 26 Mei 2023

a.n Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali
Sekretaris,



Ni Luh Pulu Seni Artini, SE., Ak, M.si
NIP. 19730618 199803 2 004

Lampiran 6

Surat Selesai Penelitian



Lampiran 7

Dokumentasi Kegiatan Penelitian



Izin penelitian dan observasi pada tanggal 01 februari 2023



Wawancara ibu Herawati pada tanggal 04 Mei 2023



Wawancara bapak Ketut pada tanggal 04 Mei 2023



Observasi destinasi wisata splash canggu 13 oktober 2022



Observasi destinasi wisata pantai kuta 08 september 2022

BIODATA PENULIS



A. DATA DIRI

Nama Lengkap : Shelda Moena Aprilita
Tempat Tanggal Lahir : Banyuwangi, 26 April 2001
Alamat : Dusun Susukan Kidul, Desa Gladag,
RT/RW 002/002, Kecamatan Rogojampi,
Kabupaten Banyuwangi
NIM : E20192081
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam
Jurusan/Prodi : Ekonomi Islam/Ekonomi Syariah
No.Telepon : 085657436485
Email : sheldaaprilita29@gmail.com

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. SD Fajar Harapan Kuta Utara (2005-2007)
2. SMP Negeri 1 Rogojampi (2013-2016)
3. MA Al-Qodiri 1 Jember (2016-2019)
4. UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (2019-2023)

C. RIWAYAT ORGANISASI

1. Taekwondo UIN KHAS Jember (2019-2020)
2. Keamanan Pondok Pesantren Putri Al-Qodiri 1 Jember (2018-2019)